



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI II DPR REPUBLIK INDONESIA
DENGAN KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (IKN)
REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan Rapat ke-	: IV : --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Senin, 3 April 2023
Waktu Rapat	: 10.30 s.d. 13.25 WIB
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Ketua Rapat	: DR. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua Kom II/F-PG)
Acara Rapat	: Evaluasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan dan Tata Ruang di Kawasan Ibukota Nusantara (IKN) Republik Indonesia
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	: 39 dari 50 orang Anggota dengan rincian: A. Anggota DPR RI: PIMPINAN: 1. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua/F-PG) 2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H. (Wakil Ketua/F-PDIP) 3. Saan Mustopa, M.Si. (Wakil Ketua/F-NASDEM)

4. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)
5. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

11 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. I Ketut Kariyasa Adnyana
4. Riyanta
5. I Nyoman Parta
6. Drs. Cornelis, M.H.
7. Ir. Hugua
8. I.G. Ngurah Kesuma Kelakan
9. H. Yadi Srimulyadi
10. H.M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.
11. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

6 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
3. Dra. Haeny Relawati R.W., M.Si.
4. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
5. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
6. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

4 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. Andika Pandu Purgabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.
3. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
4. Prasetyo Hadi

4. FRAKSI NASDEM:

1 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
2. H Haruna, M.A., M.B.A.
3. DR. Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Zulkifli Anwar
2. Rezka Oktoberia

3. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
2. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
3. KH. Aus Hidayat Nur

8. FRAKSI PARTAI Amanat Nasional:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Paulus Ubruangge
3. Khairul Muhtar, SE., M.M.

9. FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan:

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

-

ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

-

B. LEMBAGA NEGARA:

1. Kepala Otorita Ibukota Nusantara RI (Ir.Bambang Suwanto MCP., MSCE., Ph.D.);
2. Beserta jajarannya.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kita mulai ya Pak.

Bismillahirrahmanirahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Saudara Kepala Otorita Ibukota Nusantara beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Pertama-tama, kita panjatkan puji dan syukur Allah SWT karena rahmat dan hidayah kepada kita semua. Sehingga kita pada hari ini masih melaksanakan, dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita terutama kami tanggungjawab konstitusional di bidang pengawasan dalam keadaan *sehat wal'afiat*.

Rapat di Komisi II masih dilaksanakan secara *hybrid*, jadi ada yang hadir secara fisik maupun ada yang hadir secara *virtual* dan ini tentu memudahkan kita untuk mencapai kourum dan saya menyatakan bahwa kourum ini telah memenuhi kourum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenankanlah kami untuk membuka rapat ini dan rapat ini terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Kepala Otorita IKN Nusantara beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini dan juga terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Bapak/Ibu sekalian,

Saya ingin persetujuan pada kita semua soal agenda dan soal waktu yang pertama agenda kita hari ini tunggal, kita ingin mendengarkan atau juga bisa kita sebut mengevaluasi terkait dengan soal pembangunan di kawasan IKN khususnya berkaitan dengan masalah pertanahan dan tata ruang.

Apakah kita bisa setuju Bapak/Ibu sekalian? Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian kita karena kita ini hanya ingin mendengarkan perkembangan dan kemudian nanti memberikan masukan dan saran mungkin waktu kita tidak perlu terlalu lama, setengah dua belas, 11.30 ya?

(RAPAT: SETUJU)

Iya, terima kasih.

Bapak/Ibu sekalian,

Kita sudah sama-sama mengetahui dan sekedar informasi pada Kepala Otorita bahwa kemarin pada saat pembahasan pembentukan undang-undang, sebagian isu dari Pansus IKN itulah kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Komisi II ini.

Jadi, pada saat itu kami banyak terlibat langsung, apalagi saya sebagai Ketua Pansus pada saat itu betul-betul mengikuti persis ya, bagaimana juga kita mendapatkan banyak masukan, aspirasi dari masyarakat di Kalimantan dan seterusnya itu.

Nah, tentu kami ingin juga apa yang menjadi katakanlah menjadi hasil pekerjaan kami pada saat itu, ingin juga kami mendengarkan langsung *progress*-nya seperti apa? Itu kenapa pada hari ini, kami mengundang Kepala Otorita dan beserta jajarannya, sudah sampai sejauh mana? Apalagi kan kita juga sama-sama mengetahui di Prolegnas juga kita sudah memasukkan, sudah disepakati akan ada revisi undang-undang lagi tentang IKN ini. *Nah*, ini tentu juga menjadi sesuatu yang juga perlu kami ketahui begitu.

Dan kita juga sudah memahami bahwa Presiden juga sudah melakukan instruksi Presiden berkaitan dengan semua hal yang berkaitan dengan sana dan ini sebagian besar adalah mitra kami. Kalau soal pertanahan, itu pasti urusannya dengan Kementerian ATR/BPN, itu juga mitra dari Komisi II.

Kemudian kalau bicara soal tentang nanti pengalihan ASN itu juga pasti di kami karena Menteri PAN RB dan BKN itu juga mitra kerja Komisi II. Apalagi nanti kalau soal pemerintahan, misalnya istana dan segala macam itu juga pasti ada kaitannya dengan Komisi II, karena mitra kami juga adalah Mensesneg, KSP dan Sekab. Jadi, erat kaitannya banyak, irisannya banyak sekali dengan tugas-tugas seharian yang menjadi tugas tanggungjawab Komisi II.

Nah, oleh karena itu tanpa memperpanjang mukadimah, kami persilakan langsung saja kepada Kepala Otorita IKN Nusantara untuk menyampaikan penjelasannya kepada kami.

Kami persilakan.

KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (Ir. BAMBANG SUSANTONO, MCP., MSCE., Ph.D.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Name budaya,*

Om swastiastu,
Salam kebajikan,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Terima kasih.

Bapak Pimpinan Sidang,
Bapak Ketua yang terhormat Pimpinan Komisi II DPR RI,
Yang terhormat para Anggota Komisi II DPR RI,

Pertama-tama, terima kasih atas kesempatannya, kami sangat senang karena seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, sebagian besar dari cikal bakal dari undang-undang ataupun konsepsi dari IKN ini memang lahir dari Komisi II. Jadi, pada hari ini *alhamdulillah* kami dapat berkonsultasi dan juga mendengarkan masukan dan saran dari Ibu/Bapak sekalian.

Ibu/Bapak sekalian,

Ini pertama kali kami berinteraksi dengan Komisi II, oleh karena itu izinkan saya cepat-cepat saja untuk memperkenalkan, ini para Deputi kami Bapak mohon izin. Sebelah kiri saya Pak Doni Rahayu Wakil Ketua, sebelah kanan saya Pak Jaka Santos Sekretaris Otorita. Kemudian Kepala Unit Kepatuhan Hukum dan Peraturan ini Pak Ida Bagus, di sebelah kirinya Pak Deputi Transformasi Teknologi dan Digital, jadi Pak Proffesor Alibrawi, kemudian sebelahnya lagi adalah DR. Agung Wijaksono, Deputi Investasi Bapak yang mengurus-ngurus investasi. Sebelah kanan saya Ibu Dr. Wina Safitri beliau adalah Deputi untuk lingkungan hidup dan sumber daya alam, asli putri dari Kaltim Bapak. Kemudian sebelah kanannya adalah Bapak Dr. Thomas Umbu beliau adalah Deputi Pengendalian Pembangunan. Kemudian dibelakang ini, ini juga lokal ini Pak Alimudin Bapak Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, jadi beliau yang banyak bersentuhan dengan masyarakat khususnya dalam diskusi menyerap konsultasi dan sebagainya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ada enam Deputi?

KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (Ir. BAMBANG SUSANTONO, MCP., MSCE., Ph.D.):

Ada tujuh Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh, tujuh.

KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (Ir. BAMBANG SUSANTONO, MCP., MSCE., Ph.D.):

Ibu Dr. Mia, Deputi Perencanaan Pertanahan di belakang saya persis, kemudian Ibu Silvi Halim ini Deputi Sarana dan Prasarana. Semua sudah ya?

Nah ini Bapak jadi nanti kami akan sampaikan dalam presentasi, memang kami ini organisasi baru, DIPA baru kami punyai tahun ini, operasi baru kami punyai dan rekrutmen masih berjalan, jadi nanti itu merupakan salah satu yang juga kami ingin laporkan.

Baik, kami izin menggunakan tayangan Bapak.

Saya kira dengan pendahuluan kami akan sangat singkat saja karena seperti halnya diamanatkan oleh Ibu/Bapak sekalian, kami melaksanakan Undang-Undang 3 2022 tentang IKN, di mana tugas kami adalah 4P jadi (Persiapan Pembangunan Pemindahan Ibukota Negara) serta nantinya penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibukota Nusantara pada waktu nusantara nanti akan di-*declare* sebagai Ibukota *Inshaallah* pada 2024 kalau mau melihat kepada ketentuan peraturan perundangannya.

Saya *skip* saja karena ini hanya ingin menegaskan sekali lagi bahwa 4P adalah tugas kami dan jadi (Persiapan Pembangunan Pemindahan dan juga Penyelenggaraan Pemerintahan).

Lanjut.

Nah ini Bapak/Ibu sekalian, Bapak Ketua, yang tadi kami sampaikan bahwa tujuh Deputi dan dua lainnya Sekretaris dan Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan ini semacam Irjen kalau ditempat-tempat lain atau Ir ini semuanya sudah lengkap. Baru lengkap sebetulnya karena kemarin Februari baru terakhir beberapa posisi sudah kami rekrut dan kemudian sudah dilantik tetapi dalam direktur di bawahnya di dalam Eselon II-nya memang sedang berjalan Ibu/Bapak sekalian. Kami harapkan dalam satu, dua bulan kemudian ini juga akan lengkap, sehingga nantinya semua sumber daya manusia untuk mempercepat dan juga melaksanakan tugas-tugas dari Otorita Ibukota Nusantara ini akan dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Lanjut.

Karena kondisi yang kami tadi baru Bapak/Ibu sekalian, maka kami banyak menggunakan dua pasal atau dua aturan di dalam undang-undang. Di mana ada Pasal 36 yang menyatakan bahwa sebetulnya kalau kami masih dalam tahap penyiapan, tahap penguatan organisasi, maka kementerian dan lembaga yang melaksanakan kegiatan itu dapat tetap melaksanakan kegiatan masing-masing dengan berkoordinasi dengan kami, itu Pasal 36.

Jadi kalau Ibu/Bapak sekalian melihat bahwa sekarang ini banyak program-program pembangunan di lapangan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR misalnya, itu kami menggunakan pasal ini, Pasal 36 ini.

Pasal 39 ini lebih kepada pemerintah daerah di mana beberapa kegiatan yang memang sampai dengan kami nanti akan di-*declare* sebagai Ibukota Negara. Sebelum itu terjadi maka kami masih dapat meminta Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten yang terkait untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun fungsi-fungsi yang memang sudah berjalan sebelumnya, ini di Pasal 39.

Lanjut.

Ini DIPA kami Bapak/Ibu sekalian, kami buka semuanya bahwa memang masih sederhana sekali, karena ini adalah DIPA kami yang pertama Rp250 miliar dan itu hanya apa, di-*break down* di dalam dua program, yaitu program pengembangan kawasan strategis dan program dukungan manajemen. Intinya sebetulnya ini untuk katakanlah, jam *starting* ataupun memulai kegiatan-kegiatan dari Otorita Ibukota Nusantara di mana untuk pengembangan kawasan strategis ini dibagi untuk semua deputi, sedangkan dukungan manajemen ini lebih kepada dukungan dari unit-unit terkait untuk pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kami.

Lanjut.

Nah ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang memang diamanahkan oleh undang-undang, PP dan kemudian juga Peraturan Presiden untuk sesegera mungkin dilengkapi dan yang hijau ini sebenarnya adalah yang berkaitan dengan acara pada hari ini, yaitu evaluasi untuk pertanahan dan tata ruang.

Sehingga kalau kita lihat di sini ada beberapa Peraturan Pemerintah, dua Peraturan Pemerintah yang terkait ada PerPres utamanya 63, 64 dan 65 yang memang berkaitan dengan tata ruang dan pengadaan tanah. Dan kemudian ada beberapa Raperka yang nanti akan kami laporkan juga bahwa Raperka ini memang merupakan turunan dari undang-undang yang ada, PP yang ada, PerPres yang ada yang memang harus kami lengkapi sebagai bagian untuk membuat tata ruang di IKN Nusantara ini menjadi acuan bagi semua pihak.

Lanjut.

Ini enam Perka terkait yang dalam proses legislasi, ada sebetulnya lima Perka, Peraturan Kepala Otorita yang harus segera kami keluarkan ataupun selesaikan.

Ibu/Bapak sekalian,

Untuk mengeluarkan Perka memang sebagaimana lazimnya satu produk hukum mengikuti satu siklus di mana kami harus melakukan konsultasi publik kembali, melakukan juga sinergi dan harmonisasi dengan berbagai kementerian dan lembaga melalui Kemenkumham sehingga nanti Perka ini bisa kita keluarkan.

Nah, ada yang keenam ini syarat permohonan dan persetujuan pengalihan hak atas tanah di wilayah Ibukota Nusantara. Ini juga sangat penting karena ditunggu oleh semua pihak, bagaimana terjadinya transaksi misalnya di atas hak-hak atas tanah yang memang sesuai dengan tata ruang dan juga aturan-aturan lain yang kita punyai.

Lanjut.

Pada waktu 2022 mungkin sebagian Ibu/Bapak sekalian menanyakan apa saja yang sebetulnya dilakukan. Jadi, pada waktu 2022 kami memang dibantu oleh tim transisi yang dibentuk oleh Kementerian Sesneg yang terdiri dari berbagai macam Satgas untuk IKN diberbagai kementerian untuk membantu kami, karena pada waktu itu organisasi memang belum terbentuk dan baru diinisiasi, misalnya standard operasi dan tata kelola itu belum sepenuhnya kita punya itu dalam perjalanan. Tetapi ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan apa yang disebut 4K Ibu/Bapak sekalian yaitu konsolidasi, komunikasi, kolaborasi dan koordinasi. Dan 4K itu lah yang kita lakukan sehingga timbul suatu referensi bersama yang disebut *one MPP*, M-nya itu adalah *one map*, *one plan* dan *one pors*.

Jadi satu peta, satu perencanaan dan satu kebijakan karena kami melihat pada waktu kami masuk sebetulnya memang ada beberapa hal yang perlu disinkronkan, misalnya peta itu tidak sama sehingga pada waktu itu kami berupaya bersama KL-KL, kementerian lembaga untuk membuat satu referensi bersama yang keluaran dokumen yang disebut *one MPP* ini. Yang terdiri dari tiga buku, yaitu buku saku, buku panduan investasi dan buku panduan implementasi yang menjadi pedoman bagi semua pihak dalam pembangunan di IKN Nusantara.

Lanjut.

Kami masuk sekarang ke tata ruang Ibu/Bapak sekalian, tadi kami sampaikan bahwa ada beberapa produk hukum yang memang sedang kita kebut untuk kita sahkan yaitu untuk Perka otorita. Kalau kita lihat hirarkinya di sini terlihat bahwa misalnya untuk Renduk dan RTR KSN IKN itu dalam tatanan PerPres. Kemudian dibawah Rencana Tata Ruang KSN (Kawasan Strategis Nasional) ini nantinya akan ada RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang skalanya lebih detail lagi 1:5.000 dan di situlah sebetulnya wilayah-wilayah perencanaan ada di IKN itu ada sembilan wilayah perencanaan nanti kami perlihatkan. Dari sembilan itu yang sudah keluar Perkanya adalah empat yaitu kawasan inti pusat pemerintahan, IKN Barat, IKN Timur I dan IKN Timur II, mungkin di *slide* berikutnya bisa terlihat.

Lanjut.

Nah, ini Ibu/Bapak sekalian, inilah wilayah IKN. Yang abu-abu itu yang 256.000 hektar dan dari 256.000 hektar itu seperti kita ketahui bersama dan amanat undang-undang 65% atau hampir 2/3-nya akan berupa *tropical forest* atau hutan tropis. Jadi banyak bagian dari IKN Nusantara yang nanti akan dilakukan apa yang disebut refortasi atau penghutanan kembali sehingga nanti

terbentuk hutan tropis di 65% ini dan yang kita bangun hanya 25% atau seperempat dari seluruh area 256.000 hektar. Dan di dalam 256.000 hektar itu ada 9 yang kita sebut generator ekonomi IKN ke depan.

Banyak kita ketahui bahwa IKN ini diharapkan pada tahun 2045 nanti akan menjadi salah satu *super hub* untuk pengembangan ekonomi Indonesia yang lebih terdistribusi dengan baik, jadi *equality*-nya ada dan kemudian juga *gross*-nya juga ada. Jadi, dari Jawa sentris diharapkan pada 2045 nanti menjadi Indonesia sentris dan IKN ini menjadi salah satu pusat atau *hub*, *super hub* istilahnya untuk mewujudkan itu. *Nah*.

Ibu/Bapak sekalian,

Dari sembilan wilayah perencanaan ini yang empat sudah, jadi satu, dua, tiga, empat mohon maaf, satu, dua, enam, empat itu yang sudah selesai Perkanya atau peraturan kepala otoritanya. Sedangkan yang lain tujuh, delapan, sembilan, tiga dan lima itu dalam proses pengesahan dari Perka. Dalam waktu dekat saya kira ini akan bisa kita selesaikan.

Lanjut.

Untuk pertanahan Ibu/Bapak sekalian, lanjut kita lihat bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Undang-Undang No. 3 2022, PerPres 65 dan seterusnya ada dua cara atau mekanisme kita untuk mendapatkan lahan. Yaitu yang pertama adalah pelepasan kawasan hutan dan yang kedua adalah untuk pengadaan tanah. Ini dua-duanya kita lakukan untuk mengamankan 256.000 hektar yang kami sebutkan tadi. Dan mekanisme yang kita lakukan.

Lanjut.

Ini adalah sebagaimana terlihat di sini, saat ini pelepasan kawasan hutan seluas 36.150 dan 0.3 hektar ini dilakukan oleh KLHK untuk melepas kawasannya menjadi kawasan nantinya HPL (Hak Pengelolaan Lahan). Tetapi sekarang kalau kita lihat di sini proses masih berada di dalam KLHK, di mana KLHK menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan, ini sudah sampai di sana. Dan proses ini kemudian dilanjutkan tentu saja dengan proses membuat lanjut habis ini kita lihat. Jadi, ini proses yang internal di KLHK kemudian ada tim terpadu untuk melakukan verifikasi dan validasi, ini yang sudah dilakukan dalam minggu-minggu lalu untuk melihat bagaimana 36.000 ini. Apakah sudah *clear and clean* dan bisa segera diserahterimakan ke kami.

KLHK sendiri nantinya akan menandatangani BAST atau Berita Acara Serah Terima kepada Kemenkeu dan dicatat menjadi BNN dan ADP, ADP ini istilah baru (Aset Dalam Penguasaan). Jadi, secara garis besar yang tanah-tanah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi BNN dan sisanya diharapkan menjadi aset dalam penguasaan otorita yang bisa nantinya dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan peruntukkan yang sudah digariskan dalam tata ruang.

Nah, ini prosesnya, diharapkan proses ini akan segera berjalan, sehingga nantinya setelah dari Kemenkeu akan diserahkan akan diserahkan kepada kami untuk kemudian kami ajukan kepada Menteri ATR BPN untuk dikeluarkan sertifikat-sertifikatnya sebagai HPL. *Nah*, ini yang dalam proses Bapak/Ibu sekalian, *Inshaallah* ini akan juga kami inginkan satu percepatan dengan bantuan dari kementerian-kementerian terkait.

Lanjut.

Nah, di samping tadi yang pelepasan kawasan hutan tentu juga ada dari pengadaan tanah dan seperti lazimnya area penggunaan lain. Untuk pengadaan tanah ini kita lihat di sini KL-KL yang melakukan aktivitas dan akan membangun fasilitas-fasilitas infrastruktur untuk kepentingan umum. Misalnya di sini ditulis adalah PUPR membuat satu studi kelayakan dan juga DPPT (Daftar Perencanaan untuk Pengadaan Tanah) dan kemudian selanjutnya pihak provinsi dalam hal ini Gubernur akan menentukan penetapan lokasi dan pengumuman lokasi. Selanjutnya ATR BPN yang akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan proses dari pengadaan tanah itu sendiri.

Nah, ini ada-ada dua sumber dari pembiayaan untuk pengadaan tanah ini. Satu, yang berada di kementerian teknis dalam hal ini di PUPR. Satu lagi, yang melalui lembaga manajemen aset negara atau Elman. Dua-duanya kita tempuh untuk mempercepat proses, sehingga diharapkan misalnya untuk jalan tol dan sebagainya. Kami harapkan itu dapat menjadi satu percepatan sehingga di lapangan nanti pembangunan infrastrukturnya dapat berjalan dengan baik.

Lanjut.

Nah. Ibu/Bapak sekalian,

Proses terakhir sesuai dengan apa yang dimintakan kepada kami beberapa Pimpinan bahwa pada hari ini kita akan fokus pada tata ruang dan pengadaan tanah. *Nah*, ini untuk pelepasan kawasan hutan, posisi terakhir verifikasi dan validasi sudah dilakukan dan ini yang belum *clear and clean* itu tentu akan dilakukan penyelesaian oleh kementerian KLHK. Karena ditemukan walaupun ini kawasan hutan, tetapi ada beberapa kegiatan di dalam hutan yang tentunya ini harus diselesaikan dulu oleh KLHK. Sehingga *clear and clean* statusnya baru nanti akan diserahkan kepada kami. Ini yang sedang berproses sekarang.

Jadi, yang akan dilakukan adalah satu proses untuk mungkin yang belum *clear and clean* akan di-*cluster* terlebih dahulu sehingga sisanya bisa tetap diproses dan kemudian akan dilakukan pencatatan sebagai barang milik negara di keuangan dan aset dalam penguasaan, sehingga ini nantinya akan bisa kita ajukan ke Kementerian ATR BPN untuk ke hak pengelolaannya. Itu untuk pelepasan kawasan hutan.

Tetapi untuk yang pengadaan tanah, ini memang tim pemerikaaan lahan di mana K/L yang memokoi kegiatan, seperti halnya PUPR, nah itu bekerjasama dengan ATR BPN, Pemprov dan kami ini memproses pengadaan-pengadaan lahan yang ada di lapangan. Dan sumber dana untuk pengadaan tanah ini ada di DIPA-nya PUPR dan kemudian juga ada LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Dan ini diharapkan juga nantinya proses ini dapat diselesaikan dengan baik. Jadi ya kami sendiri berada dalam proses dalam *rule* sebagai fasilitator untuk menjembatani warga kami di IKN dengan para pemimpin-pemimpin proyek ataupun satker-satker yang melakukan kegiatan-kegiatan pengadaan tanah di lapangan.

Lanjut.

Saya kira demikian Bapak Pimpinan Sidang, laporan singkat kami. Karena hari ini sesuai agenda yang dimintakan kepada kami adalah yang berkaitan dengan tata ruang dan tanah.

Sehingga untuk itu kami mohon hal-hal masukkan dan saran lebih lanjut untuk mempercepat percepatan dari pembangunan berbagai macam fasilitas yang ada di lapangan.

Kami dapat sampaikan bahwa sampai saat ini berdasarkan pantauan kami kegiatan-kegiatan pembangunan fasilitas, infrastruktur dan yang lain masih dalam proses *on the track*.

Kemudian juga untuk investasi, ini juga kami menerima cukup banyak *letter of interest* 167 *letter of interest* dari sekitar 16 negara dan 50% dari *letter of interest* ini domestik 50%, lainnya adalah dari asing. Dan itu tentu kami sekarang dalam proses untuk menseleksi mana saja yang memang sesuai dan kemudian juga serius di dalam mengajukan permohonan untuk ikut membangun di IKN Nusantara.

Saya kira demikian Bapak Pimpinan, kami kembalikan kepada Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi,

Terima kasih Saudara Kepala Otorita IKN Nusantara.

Bapak/Ibu sekalian,

Tadi sudah kita sama-sama dengarkan penjelasan yang memang pada hari ini kita khususnya terkait dengan masalah soal pertanahan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak/Ibu. Pak Agung, tunggu Pak Riswan, Pak Hugua, Pak Andi, Pak Haruna, oh ini ada Pak Helmi, kemudian Pak Defriadi dan Pak Ikhsan, Pak Toha juga.

Silakan Pak Syamsurizal.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PPP):

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang sama-sama kita hormati Kepala Otorita IKN dan seluruh jajaran, Diktu sampai keseluruhan yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, dan tentunya, Ketua Komisi II beserta Anggota Komisi II yang kami banggakan,

Sudah lama sebetulnya keinginan kita untuk dapat membahas tentang IKN ini karena ini memang sesuatu yang menarik. Kalau secara internasional kita tahu persis banyak negara yang melakukan pemindahan ibukota dan itu bukan hal yang asing bagi kita. Karena kita baca seperti juga Amerika pun pernah memindahkan ibukotanya dan beberapa negara lain dan cukup banyak memang sejarahnya. Jadi tidak juga jadi persoalan untuk Indonesia memindahkan atau punya keinginan untuk memindahkan ibukotanya.

Hanya saja secara mendasar, saya awali pertanyaan saya adalah mohon dapat berkenan dijelaskan kira-kira pertimbangan strategis apa yang sampai ada kehendak penting dari pemerintah. Tentunya ini juga bersama-sama DPR RI tetapi yang diketahui oleh Kepala Otorita dan juga jajaran, dari aspek politis dan geopolitisnya sampai kita harus memerlukan memindahkan ibukota negara ini.

Saya kira Jakarta yang sudah berulang tahun yang ke-400 lebih dan itu persiapannya cukup lama, waktu yang sudah setengah 500 tahun, hampir mendekati 500 tahun, cukup lama untuk dia menjadi sebuah ibukota sejak dia dikuasai oleh Portugis. Kalau ukuran itu tempo hari tahun 1512 itu Portugis mau memasuki kawasan itu dan itu yang diukur untuk jadi ulang tahun Kota Jakarta, jadi cukup lama di Sunda Kelapa itu. Jadi yang ingin kami tahu apakah kira-kira alasan politis dan geopolitis serta pertimbangan ekonomis yang mungkin diperlukan untuk itu.

Kemudian tadi Pak Ketua juga mengkonsentrasikan pada hari ini pertemuan kita dengan Otorita IKN ini adalah bicara soal pertanahan saja dulu kita setuju itu. Oleh karena itu kami ingin memberikan saran soal rencana detail tata ruang karena beberapa provinsi yang ada di tanah air ini dan kabupaten/kotanya yang kita ketahui mereka membuat rencana detail tata ruang itu per kecamatan. Ya saya kira keliru ini.

Jadi kami berharap kalau toh per kecamatan kalau di-plot di sini misalnya untuk kawasan industri, mau berapa industri yang berada dan di mana penduduknya. Maunya per-provinsi itu atau per-kabupaten itu satu

rencana detail tata ruangnya, bukan per kecamatan, sehingga pada kawasan itu ada untuk industri untuk ukuran satu ibukota kabupaten, ada untuk tinggal, tempat tinggal penduduk, ada untuk sekolahan atau untuk kepentingan-kepentingan fasilitas umum lainnya, pasar dan lain sebagainya.

Saran kami agar RDTR untuk kota IKN ini, ya hendaklah dibuat satu ibukota IKN itu, ini jelas *floating*-nya ini untuk apa, ini untuk apa, jangan juga per kecamatan. Kalau dibuat per-kecamatan seperti yang kami lihat di beberapa tempat, tempo hari kita *survey* kita mengadakan penelitian, mereka membuat per kecamatan. Sehingga untuk tempat tinggal penduduk kecamatan ini, tempat tinggal penduduk kecamatan ini, sudah dua, kawasan industrinya kalau satu-satu masing-masing kalau dia punya sepuluh kecamatan ya *enggak* rencana detail tata ruang.

Kemudian rencana detail tata ruang ini baru dia berguna kalau betul-betul diterapkan apa yang sudah dimiliki oleh KemenPAN RB itu, maaf Menteri ATR BPN. Mereka punya konsep yang itu dikeluarkan oleh pemerintah provinsi nantinya. Pemerintah provinsi hendaknya memiliki ini yakni Tata PR, kesesuaian kegiatan dengan penataan ruang. Jika sudah dibuat begitu musti ada izin dari gubernur atau pihak otorita dalam hal ini yang mengeluarkan aturan ini harus disesuaikan RDTR, kalau RDTR-nya sudah siap. *Nah*, kamu buka usaha apa?

Jadi kalau izin-izin investasi yang datang dari luar karena terujungnya barangkali adalah secara ekonomis untuk memudahkan investasi misalnya seperti itu. Harus jelas oh mereka mau bikin pabrik apa begitu, *nah* tempatnya di sini dan itu diatur sesuai dengan RDTR-nya itu yang mengatur itu adalah pihak pemerintah otorita dan berpedoman kepada RDTR itu. Sebab kalau itu tidak diterapkan, kalau KPPR ini diterapkan sia-sia RDTR ini dibuat. Tetapi kalau RDTR tidak dibuat wah ini lebih parah lagi, bisa amburadul orang tinggal di sini, di situ ada pabrik, orang tempat tinggal situ, situ ada kuburan dan itu tidak karu-karuan ini yang terjadi di banyak kota di Indonesia saat ini. *Nah* itu yang kedua RDTR.

Kemudian apakah saya boleh menyinggung soal, soal ini tetapi status tanah. Kita dapat informasi bahwa status tanah disana itu adalah milik pengusaha, sampai sejauhmana kebenaran ini dan sampai sejauhmana penguasaan *legal* hukumnya yang dimiliki oleh IKN ini sendiri. Artinya itu milik negara yang suatu ketika tidak ada klaim dari pihak manapun, tanah ini milik kami, ini tadinya milik kami, ini sejarahnya begini. *Nah*, itukan kalau muncul lagi pada tahun 2050 klaim-klaim seperti ini setelah dia menjadi Ibukota Negara baru kan aneh juga, jadi ini perlu kita hindari.

Soal, saya singung sedikit Pak Ketua karena ada rencana KemenPAN RB bersama dengan Kemendagri, kita dapat informasinya mereka akan segera *men-drop* pegawai atau ASN yang ada di sana tetapi dalam jumlah besar. Kita berpikir waktu kita melihat itu dengan heli, 6 heli kita berputar-putar di atas IKN sekitar 4-5 bulan yang lalu, ya masih belum apa-apa. Sekarang baru merumuskan RDTR, baru apa mengatur tata ruang dan segala macamnya, apa itu keburu? Karena toh ketika pegawai pindah ke sana mereka pasti bawa

anak-anaknya. Kalau bawa anaknya, anaknya suruh sekolah, perlu guru, guru perlu tempat tinggal, perlu bangunan sekolahnya. Karena *enggak* mungkin mereka pindah terus sekolah anaknya jadi terlantar atau bagaimana. *Nah*, ini yang kami mintakan penjelasan, kira-kira sesungguhnya bagaimana ini? *Nah* sejauhmana koordinasi antara IKN dengan KemePAN RB dalam hal kepegawaian dengan Kemendagri juga dalam hal penetapan, penempatan pegawai-pegawai yang ada di sana.

Barangkali Pak Ketua ini saja yang kami sampaikan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Syamsurizal.

Selanjutnya Pak Yanuar.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si./F-PKB):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bapak/Ibu dan hadirin sekalian,

Kami senang sekali, Pak Kepala ini pertemuan pertama saya kira dengan Otorita IKN. Sudah lama kita nantikan pertemuan ini karena selama ini kita kehilangan sumber informasi yang terpercaya soal *progress* IKN. Karena itu, meskipun ini pertemuan pertama tentu kami juga ingin menyampaikan beberapa hal penting yang perlu kami ketahui terkait dengan *progress* yang berlangsung di IKN.

Saya *to the point* saja Pak Kepala soal pengadaan tanah. Kita berharap bahwa wilayah yang hari ini kita plot menjadi IKN, totalnya sekitar 256.000 total dengan beberapa zonasi yang sudah kita atur. Berharap ke depan ini tidak menimbulkan masalah, artinya tidak ada *problem*, tidak ada residu yang tertinggal pada saat proses ini terus berjalan ke depan. Karena itu dari awal kami selalu menyampaikan, mengingatkan ini *existing* hari ini sebetulnya seperti apa? *Existing* lahan yang 256.000 hari ini seperti apa?

Karena misalnya contoh tadi disebutkan perolehan-perolehan lahan misalkan dari pelepasan kawasan hutan, itu jumlahnya yang baru bisa di akses 38, 36.000, inikan masih kurang, kurang jauh, itu total sebetulnya yang berupa pelepasan kawasan hutan, itu estimasi ada berapa sebenarnya dari total 256.000 itu. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, *existing* lahan yang terkait misalnya dengan HGU-HGU yang sudah ada, itu berapa sebetulnya? Kan tidak mungkin juga disana tidak ada HGU, karena saya kira kita semua tahu di sana adalah lahan tambang, lahan industri, lahan eksplorasi dan seterusnya yang sebagian diperoleh melalui HGU. *Nah*, kita ini juga sebetulnya ingin mengetahui, ini penyelesaiannya bagaimana terhadap para pengusaha yang memiliki itu dan itu sebetulnya berapa luasnya?

Yang kedua, tanah-tanah yang sudah terdaftar atau belum terdaftar yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat yang kami maksud kategorinya banyak ada masyarakat individual, *private* mungkin para perambah hutan misalnya begitukan.

Atau misalnya tanah komunal Pak Kepala, tanah komunal, tanah adat atau bahkan mungkin tanah-tanah yang memiliki sejarah masa lampau yang panjang. Misalnya tanah-tanah kesultanan misalnya begitu dan berbagai macam tanah lain termasuk tanah terlantar.

Nah ini dari *existing* ini, itu kondisinya seperti apa sebetulnya? Karena saya tanyakan ini karena informasi soal ini sampai hari ini masih belum terang benderang. Ketika kita cek kepada BPN, BPN juga punya jawaban yang sama bahwa kami belum selesai melakukan pendataan, pendataan itu. Bahkan ketika ketemu dengan Kanwil BPN di Kaltim Pak Kepala. Pak Kanwil juga menyampaikan hal yang kurang lebih sama.

Ada hal-hal dimana *problem* pada saat perolehan tanah itu juga terus berjalan, misalnya soal klaim, ada klaim dari warga, klaim dari kelompok tertentu soal pemilikan atau penguasaan tanah itu.

Termasuk misalnya klaim dari pihak-pihak adat komunal atau pihak kesultanan misalnya, tetapi tentu klaim-klaim itu juga tidak boleh dianggap apa, tidak boleh diabaikan, tetap harus kita pertimbangkan, kita dalam kebenarannya, kemudian juga bagaimana solusinya. Itu yang pertama Pak.

Yang kedua, tadi disampaikan tanah yang berkaitan dengan bidang tanah, pengadaan tanah yang sudah diproses, ini sekitar tetapi 330 bidang ini di data yang kami terima di sini, 18 bidang sudah dibayar, 312 bidang sedang diproses.

Nah, inikan istilah bidang ini untuk menyebut satu plot tanah saja. Tetapi kira-kira area luasnya ini berapa Pak Kepala? Dari 330 bidang total luasnya itu berapa sebetulnya?

Dan itu kalau boleh kami tahu ini proses pengadaan ini anggarannya darimana Pak? Karena di mata anggaran apa, BPN ini juga tidak ada, pengadaan lahan untuk IKN. Di OIKN juga *enggak* ada. Di otorita saya kira juga tidak ada, karena tadi lebih banyak fokus ke konsolidasi internal organisasi.

Tadi Bapak menyebutkan dari PUPR misalnya, ada apa, anunya dari sana. Saya *enggak* tahu nanti skemanya seperti apa ke depan? Apakah memang pengadaan ini juga nanti akan terus dibebankan kepada APBN, jika misalnya betul itu hari ini ditangani oleh PUPR atau ada skema lain? Nah kalau skema lain itu bertabrakkan *enggak* dengan aturan yang apa yang ada.

Kalau pengadaan tanah ini untuk IKN tentu ini otoritasnya adalah otoritas kepentingan negara berarti negaralah yang harus membiayai, kira-kira begitu. Tetapi kalau setelah dihitung itu pembiayaan yang sangat besar untuk pengadaan tanah lantas gimana jalan keluarnya ke depan Pak? Karena ini penting harus dibahas disesuaikan dari awal. Dan apakah memungkinkan ini kemudian melibatkan pihak swasta atau investor untuk pengadaan tanah itu? Apakah skema ini juga dibolehkan menurut aturan pengadaan tanah begitukan, karena ini *toh* asetnya adalah aset negara.

Jadi, saya kira penting ini Pak, duduk perkara ini dari awal sudah mulai kita urut supaya ke depan tidak timbul residu itu kemudian membengkak menjadi sesuatu yang besar. Karena ini ibukota negara, ini isunya internasional dan semua pihak dari berbagai macam penjuru dunia juga memperhatikan soal ini. Bukan saja para investor, para kepala negara di tempat lain tetapi juga pihak-pihak lokal yang berkaitan dengan IKN itu, saya kira juga sangat berharap bagaimana perkembangannya ke depan. Dan tentu mereka terfokus pada hari ini pada pemenuhan hak-hak dan apa istilahnya, hak-hak yang mereka miliki, yang jangan-jangan terserabut karena hadirnya Ibukota Negara.

Saya kira itu saja Pak Kepala, terima kasih atas waktunya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Yanuar.

Selanjutnya Pak Agung.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang pertama kami mengapresiasi atas penyampaian data dan materi yang cukup terstruktur dan sistematis tetapi ada beberapa hal yang jadi catatan kami sehingga perlu kami ajukan pertanyaan melalui Pimpinan.

Yang pertama, kalau kita melihat aspek regulasi, tentu lembaga otorita ini sudah berdasarkan undang-undang mengenai otorita, tetapi yang belum kami baca di sini dari aspek regulasi. Mulai dari peraturan-peraturan pemerintah, PerPres, Peraturan Kepala Otorita, Peraturan Menteri dan juga

Peraturan Kepala Lembaga, ini kami belum mendapatkan kejelasan sebetulnya berapa lama masa kerja, tugas lembaga otorita ini ya, ini satu.

Ini menjadi penting karena betapa pun di dalam hirarki ketatanegaraan kita mengenal ada struktur pemerintahan mulai dari bawah, pemerintahan desa, pemerintahan kelurahan, kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat. *Nah*, pemerintahan otorita ini, sebatas pemahaman kami adalah transisi ketika membuka lahan baru kita bertekad membuat Ibukota Nusantara. Pertanyaannya berapa lama masa tugas tersebut?

Kemudian yang kedua, dari aspek historis, sering kami mendapatkan pertanyaan dari warga masyarakat di Dapil yang mereka awam. Kenapa sih kok perlu dipindah iya kan? Apakah ini ingin menghapus aspek kedaerahan, kemudian yang paling penting lagi dari masa tugas ini kami berharap supaya tidak terjadi tumpang tindih. Karena tugas pokok dan fungsi yang kami lihat di sana adalah dari sisi persiapan, pembangunan, pemindahan sampai dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Jangan sampai terulang dikotomi kewenangan antara pemerintah otorita seperti halnya terjadi di Batam. Pemerintah otorita dan pemerintah Kota Batam pada saat itu. Kalau sampai terjadi kemudian berakibat fatal, investor yang semula datang di sana, akhirnya mereka kesulitan karena ada dua kewenangan. Akhirnya sekarang Batam menjadi sepi, banyak investor yang pindah.

Pada bagian lain, izin melalui Pimpinan, kami melihat ada struktur anggaran untuk kegiatan otorita IKN ya, total pagunya Rp253 miliar di situ, terbagi dalam program pengembangan kawasan strategis dan program dukungan manajemen. Ini mohon nanti tolong dilengkapi Pak, jadi total ini masing-masing program ini di kedeputan itu berapa, berapa, berapa.

Saya belum mengerti ini tugas, pokok, fungsinya IKN ini bermitra dengan Komisi XI kah dari sisi anggaran atau dengan Komisi II? Tetapi dengan hormat dan sangat kami minta kepada Pimpinan, kalau sudah otorita ini ada tugas pokok fungsi penyelenggaraan pemerintahan, apapun sepanjang masih dalam wilayah kedaulatan NKRI, mitra dari pemerintahan dalam negeri itu ada dengan Komisi II. Sehingga *progress report* perkembangan pelaksanaan dari penyelenggaraan IKN, pemerintahan. Mulai dari persiapan pembangunan harus setidaknya kita sama-sama apa, ada pembahasan di Komisi II ini ke depan ya Pak ya.

Mudah-mudahan Pimpinan otorita ini tidak alergi dengan teman-teman Komisi II. Yakin dan percaya teman-teman Komisi II tidak galak seperti teman-teman komisi lain ini Pak, kita bersahabat begitu. Tetapi juga Bapak jangan sampai melupakan teman-teman Komisi II karena aspek pemerintahan dalam negeri ada di sini Pak. Tidak seperti pemerintahan desa yang dulu waktu dipegang oleh senior saya ini karena Pak Jokowi waktu itu *sample-nya*, pusatnya adalah fokusnya pembangunan infrastruktur sehingga pembinaan pemerintahan desa lepas dari kemitraan Komisi II. Saya berharap tidak terjadi di otorita ini tetap ada di kita.

Persoalan tentang tanah dan lain-lain saya hanya titip saja Pak, mana yang merupakan wilayah kedaulatan adat dan juga kemudian ada beberapa yang mungkin sudah dikuasai oleh mungkin pengusaha sipil ataupun warga negara yang merupakan hak milik. Hal-hal terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka, mohon tetap dilaksanakan dengan secara cermat sesuai dengan aturan regulasi yang ada. Kami tetap berbaik sangka Pak.

Selamat bertugas dan nanti tetap kita mohonkan ada *progress report* dari itu dan saya tunggu mengenai rincian anggaran untuk organisasi IKN ini, otorita IKN ini.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Agung.

Saya mengingatkan kita bahwa kita tidak usah lagi *side back* ke belakang mempersoalkan sejarah kenapa, apa namanya IKN ada dan segala macam. Ini kita fokus sekarang ini sudah *given*, ini barang sudah ada begitu, undang-undangnya juga sudah ada.

Nah yang kita mau tanya perdalam hari ini soal masalah pertanahan ya dan pembangunannya, kira-kira begitu.

Pak Riswan.

F-PG (Drs. H. RISWAN TONY, DK):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ketua dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibukota Negara,
Pak Bambang dan Mas Toni beserta jajaran yang saya hormati,

Saya sedikit saja urun rembuglah Pak Bambang sama Mas Toni.

Pertama saya kaget tentang tanah tadi yang 256.000 hektar pertanyaannya untuk apa? Kedua terhadap pembangunan ini seperti tidak terarah Pak. Logikanya seperti yang dikatakan Ketua, tadi bahwasannya kalau sudah otorita Pak Bambang itu otomatis menjadi rekan kerjanya Komisi II Pak. Kenapa saya katakan otorita lebih dulu? Supaya otorita ini dibangun infrastrukturnya Pak, kan begitu Pak, ini ada otorita lalu infrastrukturnya dong.

Sekarang otorita ngantornya di mana? Di Jakarta, Balikpapan, tetapi belum ada kantornya ya, sudah ada ya?

Jadi terhadap otorita inilah yang *supporting* infrastrukturnya, itulah cara membangun sebuah kota Pak. Jadi, 256.000 ini justru cuma *master plan* Pak. Jadi prioritas terhadap infrastruktur itu yang lebih penting, bandara, lalu kalau ada pelabuhan-pelabuhan itu, sedangkan yang lain-lainnya mengikuti Pak. Kita tidak bisa paksakan apalagi otak kita berpikir bahwa Jakarta akan dipindahkan kesana, itu *enggak* mungkin Pak. Tetapi IKN ini adalah ibukota administratif, yang ada dipikiran kita Presiden beserta Menteri-menterinya ada di sana, kedutaan ada di sana. Lalu jangan berpikir juga dirjen-dirjen ada di sana tetapi cuma Menteri, apalagi sekarang ini dunia sudah dekat sekali karena teknologi yang begitu canggih. Tidak perlu karyawan atau Dirjen untuk pindah berbondong-bondong ke sana tetapi kota administratif terhadap Ibukota itu penting Pak.

Kan banyak contoh Pak, ada Canberra. Washington sendiri bukan kota industri tetapi Ibukota administratif atau kita mau contoh kaya Belanda. Belanda itu semua administratifnya ada di Den Haag tetapi Ibukota tetap Amsterdam. Jadi pikiran-pikiran seperti ini Pak, jangan kita membayangkan Jakarta ini mau pindah ke sana, ini kan menakutkan semua karyawan dan sebagainya, tetapi fokus kepada infrastruktur. Misalnya kita istana, istana lalu dibuatlah jalan, untuk menuju ke sana apa jalan tol, jalan tol prioritas, ada bandara prioritas. Justru kalau umpamanya pembebasan lahan, justru untuk kepentingan infrastruktur ini saja, tidak perlu kita paksakan sampai 256.000 hektar. Saya ngebayanginnya saja sudah susah Pak.

Itu kotanya Mas Doni di BSD, 33 tahun cuma begitu Pak sayang, memang harus begitu, *smooth*. Putra Jaya Pak cuma berapa hektar mereka mungkin sekitar 200-300 hektar yang dikembangkan, sisanya swasta Pak, mengalir, ada sekolahan, ada apa itu kan mengalir Pak. Kita *enggak* bisa paksakan ada sekolah begini, lah orang muridnya *enggak* ada. Tetapi harus dulu otoritas ini apa otorita ini yang dijalankan dulu.

Nah, saya minta juga terhadap karyawan jangan dipaksakan berlebihan karena seperti pengalaman yang sudah-sudah terhadap kementerian. Apalagi rekrutmen terhadap karyawan baru, karyawan seniornya tidak ada kerjaan, cuma merintah-merintah saja, kan sudah tahulah Pak Bambang itu, kita di Komisi V dulu juga kan begitu Pak. Jadi, pikiran ini saya membuka pikiran saja kepada teman-teman khususnya deputi, jangan berpikir besar-besar terus, apa satu tahun *enggak* ada *progress* Pak, padahal kalau kita bangun istana jadi Pak, satu tahun, saya yakin jadi.

Lalu buat kementerian, kementerian cukup menteri dan dirjen-dirjen saja, Dirjen juga bolak-balik saja Pak, jangan membayangkan semua karyawan pindah kesana, ya seperti Belanda lah Pak. *Nah*, memang kita tidak bisa mengulang lagi bahwa ini tetapi terhadap pembebasan lahan kalau *enggak* penting di stop dululah Pak ya, alih fungsi lahan nyebutnya. Tetapi bahwa 256.000 hektar ini kita buat *master plan* seperti di Shanghai itu perlu Pak. Tetapi terhadap tata ruangnya ya harus *kekeuh* tidak boleh berubah. Di Shanghai itu

dibuat infrastruktur tetapi setiap pembangunan sudah sesuai dengan tata ruangnya. Kalau ini pertanian ya pertanian, tidak boleh dirubah-ubah, kalau memang ini Gedung bertingkat minimal 4 lantai ya harus 4 lantai, tidak boleh.

Nah, ini terhadap 256.000 hektar tadi, sehingga ke depannya tidak ada lagi ruri-ruri yang seperti yang di Batam Pak. Batam itu kan tidak terlalu besar Pak, *enggak* bisa pemerintah otoritanya meng-*handle* orang datang mengkapling-kapling. Bisa Bapak ngebayangin itu perlu berapa Batalyon kita kesana untuk menghadapi orang-orang datang mengkapling, tetapi biarkan Pak, kalau toh ada swasta, swasta biarkan saja. Itu urusan mereka masing-masing, pengamannya masing-masing, tidak perlu kita alih fungsi. Apalagi hutan, kalau *enggak* penting biarkan hutan itu alami jangan disentuh-sentuh, tetapi kalau toh di situ ada infrastruktur jalan atau untuk air, resapan air seperti di Bintan itu penting Pak.

Nah, masukkan lainnya lagi tolong juga di, terhadap tadi sudah saya sebutkan terhadap rekrutmen karyawan itu benar-benar dipikirkan khususnya untuk deputi-deputi kalau tidak penting-penting banget *enggak* usah dulu Pak ya. Kita bekerjanya kan sporadis.

Jadi, sisa masa kerja Pak Jokowi sampai 2024 di 1 Oktober semestinya istana sudah jadi, kantor-kantor menteri sudah jadi dan jalanan sudah jadi Pak. Tidak melulu tanahnya sampai sekarang diobrak-abrik begitu Pak, sayang saya lihat sendiri Pak, walaupun saya belum kesana tetapi kok bikin kotanya begini.

Nah, ini ada ahlinya Pak Doni ini sudah berpuluh-puluhan tahun di BSD saya rasa itulah yang penting untuk kita kedepan. Infrastruktur Pak, otoritanya diperkuat, sehingga setiap Deputi mengajukanlah suatu program-program dan itu harus melalui Komisi II Pak, sehingga kontrol kita ada. Tetapi kalau Bapak cuma mau meminta uang, minta uang terus itu sulit ada di Komisi XI. Tidak terkontrol seperti sekarang, tetapi kalau ada di Komisi II, Deputi ini kebutuhan berapa, Deputi ini kebutuhan dan itu ada di kami, sehingga kedepannya kita bisa lihat, *chek and balance*-nya ada di sini Pak.

Nah, ini tolong juga Pak Ketua, Pimpinan, dikatakanlah sama Pimpinan DPR bahwa ini otorita ini harus ada di sini. Sehingga pembangunannya fokusnya di otorita Pak, bukan di infrastrukturnya.

Nah, otorita yang mana duluan yang harus kita kembangkan, *nah* itulah infrastrukturnya yang kita jalankan tetapi terhadap jalan, bandara, pelabuhan itu penting, itu prioritas Pak. Sehingga nanti orang dengan sendirinya akan datang, investor akan datang tanpa harus kita *setting*, sulit untuk men-*setting* satu ekonomi yang sudah berjalan.

Saya rasa itu saja Ketua. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Riswan Tony.

Selanjutnya Pak Hugua.

F-PDIP (Ir. HUGUA):

Baik, baik Pimpinan terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota yang saya hormati,
Pak Kepala Otoritas IKN dan seluruh jajaran,

Pertama, saya apresiasi pertemuan pagi ini untuk pertama kalinya saya mendengarkan secara teknis dari otorita dan yang menarik kita lihat adalah *one map, one planning, one policy* berarti kita membayangkan IKN ini begitu indahnya kira-kira, kaya gambaran sebuah taman yang indah sekali. Seolah-olah akan indah seterusnya.

Lalu pertanyaan saya bagaimana membuat indah ini menjadi kenyataan. Dari aspek *drawing*, dari aspek teknik, dari aspek *planning* tata ruang dan semuanya itu ilmu yang sudah ada dan pasti saya yakin sempurna.

Yang menjadi masalah Pak Kepala IKN Otorita, kira-kira perlindungan apa secara hukum atau institusi atau perangkat hukum apa untuk melindungi yang Bapak *design* ini, sehingga ke depan otorita ini kota yang indah hanya 25%-nya dijadikan bangunan selebihnya adalah ya taman kira-kira indah semua ini. Sebab kenyataannya seluruh kota-kota di dunia ini apalagi ibukota pasti baik dalam *design* awalnya, tetapi karena ada perlindungan hukum atau perangkat hukumnya yang kurang kuat setelah berjalan sepuluh tahun, lima belas tahun, dua puluh tahun menjadi kota-kota yang sangat *semrawut* kaya Jakarta misalkan.

Contoh misalkan yang Pak Riswan tadi mengatakan bahwa jangan fokus barang ini semata kepada aspek teknik, sebab otorita ini mengelola tata kelola bukan membangun infrastruktur itu yang pasti dipahami, tata kelola otorita, berarti yang dibangun adalah perangkat. Mulai dari perangkat aspek *planning*-nya, aspek hukumnya, keterlibatan masyarakatnya seluruhnya diatur, sehingga saya katakan tadi benar, saya setuju bahwa mitra Bapak itu mustinya di Komisi II, karena ada deputi-deputi yang menata tata kelola, bukan kita bangun infrastruktur sekali lagi. Sehingga anggaran Bapak 235 ini menurut saya terlalu sedikit kaitannya dengan IKN.

Pertanyaan selanjutnya, kalau Bapak mau mengusulkan anggaran lalu bagaimana kami Komisi II bisa melihat evaluasi kinerja deputy-deputy Bapak kalau tidak membuat rincian berapa cakupan kinerja, tahun berjalan, lalu apa hasil di lapangan? Ini penting karena selama ini kami sebagai Komisi II belum melihat itu untuk menaikkan anggaran Bapak di tahun-tahun berikutnya. Pertanyaan teknisnya sekali lagi bahwa aspek teknik *legal, drawing, blue print, everything its ok.*

Pertanyaan saya Pak, karena ini Bapak merombak hutan, hutan itu menjadi *concern* internasional, kita bicara *climate change bla, bla, bla.* Pertanyaan saya ini sangat *sensitive* dalam dunia internasional khususnya kaitannya dengan masalah-masalah apa namanya lingkungan. Terutama pada ancaman terhadap *wild life* yang terancam, misalkan orang utan, itu harus bisa dijawab Pak, seperti ini jadi polemik karena orang-orang LSM, pasti itu.

Yang kedua Pak dalam pengadaan hutan, pengadaan tanah apa keterlibatan masyarakat lokal dalam proses Pak ya, saya tidak bicara tentang tanah Bapak itu bayar, tanah masyarakat tetapi bagaimana melibatkan mereka dalam proses. Terus lembaga adat di sana, pemuka-pemuka adat, apakah juga dilibatkan dalam proses, sebab kalau tidak, ini juga jadi masalah besar ke depan. Karena kalau itu ribut mereka ini bukan persoalan teknisnya tetapi tata kelolanya, tata kelolanya dan bagaimana keterlibatan masyarakat, karena di situ selalu terabaikan dalam pembangunan, selalu terabaikan akhirnya masyarakat menjadi sekelompok yang selalu dirugikan di dalam proses. *Nah,* saya meminta ini menjadi atensi penting karena berkaitan dengan tata kelola IKN.

Yang terakhir Pak baru-baru Bapak dari IKN ini merekrut ada isu, ada berita, apa benar itu terjadi tentang tenaga honorer, saya dukung itu Pak, karena itu keniscayaan, tenaga honorer di Indonesia selama bangsa ini ada tidak akan pernah dilepas, karena memang negara tidak bisa melengkapi semua. Tetapi kan ada Batasan hukum kita Pak. Undang-Undang No. 14 2004, No. 5 2014 itukan hanya dua yang dikenal, PNS dan P3K, yang Bapak rekrut ini di mana? Dan bagaimana kaitannya gonjang-ganjing Indonesia sekarang tentang honorer yang mau ditiadakan pada *bla-bla-bla* macam-macam ini.

Saya kira itu saja Pak, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Hugua.

Pak Andi.

F-PG (Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, M.B.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera buat kita semua,

Kepala Otorita IKN beserta wakil yang saya hormati beserta,
Seluruh Deputi dan jajarannya,
Rekan-rekan Komisi II yang saya banggakan,

Saya *enggak* banyak-banyak Pak Bambang, dari pemaparan Bapak sudah bagus, terima kasih pemaparannya dan kami juga tambah juga pengetahuan tentang perkembangan IKN.

Saya ingin menanyakan Pak, mengenai *master plan* IKN ini sudah untuk 260.000 hektar itu sudah ada atau belum begitu Pak? Terus ini dalam waktu kita membentuk IKN memang sudah ada waktu itu, terus yang sudah menjadi RDTR sudah berapa persen begitu Pak? Ya Pak ya, karena Bapak ini kan ada darat dan ada laut juga kalau saya *enggak* salah, ya Pak ya.

Terus kita ini juga mau tahu *road map*-nya ini sampai selesai RDTR ini dalam untuk jumlah 260.000 hektar ini kira-kira kapan selesainya Pak? Jadi, kita mau tahu *Road Map*-nya apa sudah selesai per hari ini, saya *enggak* tahu, jadi kita mau tahu Pak, itu kenapa?

Karena Bapak ini berpacu ini sekarang ini untuk fisik iya juga, untuk membereskan lahan-lahan iya juga, karena walaupun penyelesaian lahan pun dari kementerian pun sudah ada 36.000 tetapi yang sisa ini bagaimana? Karena di dalam rencana Bapak ini kan ada wilayah juga untuk swasta nantinya, perdagangan atau apa, investor yang mau masuk, ini kan perlu tahu Pak dan ini nanti terakhirnya bagaimana ini? Apa karena lahan ini kan aset pemerintah, karena Kementerian Keuangan menyerahkan ke Bapak kan untuk pengelolaannya.

Ini nanti swasta masuk, investor masuk, ini bagaimana posisinya nanti, legalitasnya itu bagaimana itu Pak. Karena kita juga memang perlu Pak, di Komisi II ini bukan hanya sekedar menyampaikan saran ya, masukkan kepada Bapak, menanya, bukan itu Pak. Juga kita sebetulnya pengen tahu juga apa sih yang Bapak butuhkan dari Komisi II ini, dukungan apa begitu ya? Karena tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan kita *enggak* ngomong ke belakang, ke depan.

Jadi, kira-kira Bapak sampaikan, karena dari presentasi Bapak kan itu belum detail, menurut saya belum detail dan kendala-kendalapun belum Bapak masukkan, jadi ini kalau bisa juga Bapak sampaikan.

Mungkin itu dari saya, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Amin.

Pak Haruna.

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Bismillahirrahmanirahim.

Yang kami hormati Pak Ketua,
Teman-teman Otorita dan seluruh rombongan,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera buat kita semua,

Saya langsung Pak, yang pertama Deputi Perencanaan Pertanahan. Ini kita perlu sekarang awasi mafia tanah. Di sini saya lihat belum dibentuk Direktur Pertanahan, ini untuk Pak Ketua ini dipercepat ini satu hektar. Karena nanti pas kita nyari penguasaan tanah menggunakan nama orang lain, ya dua hektar per-orang tetapi kan 100 orang akan resep pada Pasal ini, ini pasti terjadi menggunakan orang putra di sana, ini kita harus awasi sampai sekarang, dari sekarang.

Kemudian yang kedua, untuk Deputi Investasi dan Perencanaan Pembangunan. Ini kita lihat sekarang Pak, pemerintah sudah sukses membentuk satu perizinan satu atap tetapi atapnya satu mejanya banyak. Ini apa bisa di otorita nanti ini tetap atapnya satu? Kalau perlu mejanya pati saja cukup daftar, pemeriksaan, sesuai, keluarkan izin.

Sebab kalau menggunakan tujuh meja, meja satu cuti hamil Pak, meja kedua cuti melahirkan, meja ketiga keluarganya babe tidak hadir, kan mandek Pak. Ini kalau perlu diterapkan pertama di otorita Batam Pak, satu atap tiga meja Pak, cukup.

Dan juga terakhir ini banyak teman-teman singgung supaya diperketat Pak, supaya yang terjadi selama ini seperti *master plan* kota Pak, yang terjadi itu *master plan* walikota. Sebuah kota itu *master plan* yang jadi, yang harus kita awasi di sana *master plan* kotanya tidak berfungsi Pak. Selama ini saya lihat *master plan* walikota atau *master plan* gubernur, siapa gubernurnya ya itu *master plan*. Saya kira itu Pak, empat pertanyaan. Mudah-mudahan tercatat semua.

Allahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Haruna.

Pak Helmi.

F-PKB (DR. Ir. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI):

Baik.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Allahumma sholli wa sallim'ala wabarik alla sayyidina Muhammad wa'ala ali
sayyidina Muhammad,*

Perkenalkan sebelumnya nama saya Helmy Faisal naturalisasi dari Komisi I Pak sebelumnya.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi II,
Yang saya hormati Kepala Otorita IKN Pak Bambang,
Mas Doni dan juga segenap jajaran,
Bapak/Ibu dan saudara-saudara sekalian,

Pertama, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa perintah untuk melaksanakan sekaligus menyelenggarakan Ibukota Nusantara ini, Ibukota Negara ini adalah merupakan perintah dari konstitusi di mana Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 telah diputuskan oleh pemerintah bersama DPR. Maka saya kira dalam kaitan ini, tentu saja kita selesai untuk mendiskusikan pro kontra terkait dengan IKN.

Nah yang kedua kalau kita melihat visi dari IKN ini sangat gagah sekali Pak, ada tiga yang saya baca yang pertama adalah sebagai *city of the world* ya sebagai kota kesinambungan dunia. Yang kedua adalah *city of business* ya karena untuk mendorong perekonomian Indonesia dan yang ketiga disebut sebagai *city of diversity* sebagai kota simbol dari keanekaragaman ataupun keberagaman. Melihat Indonesia merupakan negara dengan karakteristik masyarakat yang begitu rupa, adanya perbedaan agama, budaya, bahasa, golongan dan seterusnya.

Nah, maka untuk mewujudkan cita-cita besar ini ya, saya mencatat beberapa hal ya, yang intinya adalah yang pertama yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang sudah sangat baik sekali, sudah sangat sistematis. Hanya saya pertanyaan saya di mana sesungguhnya letak yang disebut sebagai *public private patnership* keikutsertaan dari sektor-sektor non pemerintah, keikutsertaan lembaga-lembaga non pemerintah ya yang saya kira justru merekalah yang nanti pada akhirnya akan punya peran besar ya. Karena kalau seluruh pengalokasian anggaran beban dari penyelenggaraan IKN ini semata-mata diserahkan, ditanggungjawabkan kepada APBN kita Pak. Tentu ini *bledding* Pak dalam pengertian kita masih punya PR untuk pengentasan

kemiskinan pasca Covid, memerlukan *survive* kembali dan kompleks sekali, ada krisis dunia seterusnya dan seterusnya.

Maka kita sebetulnya ingin pada kesempatan ini ada semacam harapan ya bahwa misalnya pembagian tugas, ini ada semacam *pie chart* begitu Pak bahwa tanggungjawab renstra mungkin 20-30 tahun ini, beban yang akan dikelola APBN itu berapa persen. Selebihnya adalah mungkin dari China dari negara-negara luar seperti Uni Emirat Arab yang kemarin sempat gagal misalnya, kita *enggak* tahu nanti dari negara mana saja yang akan ikut didalam keterlibatan ini. Jadi, itu pertama sekali saya kira sangat substansial terkait dengan keberadaan IKN.

Nah, yang selanjutnya adalah membangun IKN itu tidak semata-mata sekedar membangun sebuah *real estate* Pak. Jadi, bukan hanya seperti kita misalnya ada membangun perumahan seperti karawaci di BSD, Alam Sutera dan seterusnya ya, tetapi membangun IKN itu membangun sebuah tata kelola pemerintahan ya. Yang tentu ini dari banyak aspeknya ini harus diperhitungkan.

Misalnya pertanyaan saya Pak, seberapa siap kita menjaga *borders* kita Pak ya, karena kita lihat di situ ada perbatasan dengan Kuching, dengan Malaysia yang selama ini kita semua tahu ada banyak masalah di sana Pak terkait dengan apa namanya pintu kita yang keluar masuk yang tidak terlalu aman. Mungkin terjadi penyelundupan dan seterusnya dan seterusnya. Ini karena ini berkaitan dekat sekali dengan Ibukota Negara. Dalam hal ini tentu memerlukan memang penjelasan dari TNI POLRI terkait dengan seberapa siap kita untuk menjaga *borders* kita ini dalam konteks menjaga kedaulatan kita dalam konteks pengelolaan IKN ya.

Nah, yang selanjutnya adalah kita harapkan bahwa IKN ini akan menjadi *prototype* atau menjadi percontohan bahwa Ibukota Negara yang dibangun itu seluruhnya berdasarkan atas yang disebut sebagai membangun berbasis pada *local wisdom* kearifan-kearifan lokal. Jadi, dari segi arsitekturnya pun ini jangan sampai juga terlalu modern minimalis Pak tetapi juga harus tetap kuat dengan etnisitas, kuat dengan kekuatan budaya yang dimiliki oleh kita ya, ini juga harus mempertahankan kearifan-kearifan lokal ini harus kuat ya.

Nah, yang kedua, kualitas air, kualitas udara, penggunaan solar energi ya ini juga harus tergambar ya, berapa persen kawasan hijau, sehingga ini bisa menjadi *prototype* untuk percontohan ya bagi yang lainnya Pak. Bahkan ini bisa menjadi apa namanya dalam tanda petik secara *enggak* sadar akan menjadi kota wisata Pak. Sungai yang dibentuk, kalau tadi ada isu soal banjir diskusi dengan Pak Bambang secara informal diluar tadi. Kalau ada isu banjir, kalau kita bikin sodetan atau sungai ya maka itu bisa menjadi sebetulnya terkelola dengan baik bisa menjadi satu kawasan wisata tersendiri.

Jadi, dalam kesempatan ini tentu kita harapkan dan kita doakan ya Pak Bambang dan teman-teman akan berhasil melaksanakan tugas ini dan tentu sesuai dengan harapan Pak Presiden Jokowi ya di Bulan Agustus mungkin di Tahun 2024 kita bisa menyaksikan Istana Negara di IKN sebagai bagian dari upaya kita untuk melakukan perimbangan sekaligus pendistribusian peran-

peran zonasi kota ya. Meskipun kalau kita lihat ada beberapa negara yang gagal, mungkin di situ kita bisa belajar seperti di Australia ya, tidak kurang seperti John Howard kemudian Paul Kipping menyebut 1912 Canberra itu adalah kota pemerintahan yang gagal. Di Malaysia juga sama tidak terlalu berhasil ya, tetapi kalau di Indonesia saya kira ya kalau bukan optimisme kita untuk membangun IKN apalagi ya.

Jadi, untuk itu saya pribadi selaku Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PKB tentunya memberikan *support* dukungan kepada pemerintah agar IKN ini terlaksana dengan baik.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Helmy.

Pak Difriadi.

F-GERINDRA (Drs. DIFRIADI):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua,
Yang kami hormati Pimpinan Komisi dan seluruh Anggota DPR RI,
Yang kami hormati Pimpinan Otorita dan seluruh jajarannya,

Saya perkenalkan nama saya Difriadi No. A-126 dari Partai Gerindra Pemilihan Kalimantan Selatan II. Kenapa saya sampaikan Kalimantan Selatan II agar diketahui bahwa saya berbatasan dengan Ibukota negara, jadi wilayahnya Kabupaten Kota Baru yang berbatasan dengan Ibukota Negara.

Karena berbatasan maka ingin mohon penjelasan dari Pimpinan Otorita mengenai konsep pengembangan SDM khususnya wilayah sekitar. Kemudian bagaimana solusi pertanahan yang masih ada kendala di tanah-tanah penguasaan-penguasaan adat. Yang ini barangkali perlu ada pendekatan khusus untuk melibatkan agar IKN ini bisa berjalan dengan baik.

Saya secara pribadi dan sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan. Setelah Undang-Undang IKN ini diputuskan kami sangat gembira, kami sangat senang dan kami sangat *support*. Oleh karena itu ketika ini dibicarakan latar belakangnya kenapa? Saya sependapat dengan Pimpinan Komisi bahwa motif-motif kenapa itu tidak perlu kita bahas lagi karena sudah selesai tentang Undang-Undang IKN ini, tinggal implementasi yang kita *support* kita sukseskan dan kita bantu.

Nah, oleh karena itu kami berharap optimis ini harus kita bangun, banyak tulisan, banyak harapan masyarakat Kalimantan bahwa optimis ini harus kita bangun dan saya percaya Pimpinan Otorita dan seluruh jajarannya punya integritas untuk itu.

Berkaitan dengan integritas itu apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi bagaimana nanti suatu saat, kita sudah punya pengalaman pembentukan otorita-otorita kota-kota baru di Indonesia yang masih ya dianggap setengah gagal karena munculnya persoalan-persoalan sosial budaya yang kita tidak bisa atasi.

Misalnya bangunan-bangunan atau ruli-ruli yang disampaikan kawan-kawan tadi itu bagaimana mengantisipasi ruli ini tidak berkembang, bisa kita terdeteksi dan kita bisa atasi. Sehingga betul-betul kota yang tiga tadi saya lupa nama-namanya kota, sebagai kota *city* apa itu macam-macam itu, itu betul-betul impian kita ya.

Jadi, tidak menjadi kota yang gagal atau *semrawut* nantinya. *Nah*, ini dari awal kita bikin pijakannya sangat jelas dan penjelasan dari Bapak Pimpinan tadi sudah sangat jelas dibagi berapa zona tetapi berharap zona pangan ini untuk kami Kalimantan Selatan zona pangan jangan terlalu banyak disitu Pak. Jadi, presentasinya *enggak* usah besar, biar kami saja nanti menyediakan pangannya. Kalimantan Selatan yang menyediakan pangannya, kita distribusi ke sana, karena ketika itu berkembang Kalimantan Selatan sebagai wilayah yang lumbung padi, lumbung pangan, itu bisa memberikan kontribusi kepada IKN.

Saya kira itu saja harapan kami dan mudah-mudahan kita lanjutkan Pak, kita teruskan, kita mantapkan apa yang disampaikan Pak Helmy tadi, kita dukung, kita *support* mudah-mudahan IKN tetap berhasil dan harus kita perjuangkan dengan sekuat-kuatnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Difriadi.

Pak Ihsan.

F-PDIP (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B,Comm., ME.Con.):

Terima kasih Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,
Pimpinan Komisi II dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Kepala Badan Otorita Ibukota Nusantara, Sekretaris,
Wakil Ketua dan seluruh jajaran yang kami banggakan,

Pertama-tama tentu kami sangat mengapresiasi kerja-kerja Ibu/Bapak selama ini, karena bukanlah suatu hal yang mudah untuk menjalankan sebuah unit organisasi yang di dalamnya sesungguhnya ada nilai-nilai politis yang sangat tinggi Pak.

IKN ini sebuah mega *project* yang memang punya visi, misi ke depan yang besar, sebuah aktualitas dari mimpi-mimpi *founding fathers* kita dari zaman dulu ingin memindahkan ibukota. Maka kerja Bapak itu bukan hanya sekedar soli atau kerja normal birokrat tetapi juga banyak sekali muatan-muatan politisnya.

Oleh karena itu dalam pengerjaannya saya berharap Bapak/Ibu harus betul-betul hati-hati karena pasti semua akan dipolitisir. Kita belum tahu nanti bagaimana hasil pemilu 2024, jangan-jangan ceritanya lain lagi Pak. Oleh karena itu semua yang ada di sini menjadi *stakeholder* pembentuk Ibukota Nusantara yang baru kita pastikan semua berjalan lancar dan berhasil. Itu yang pertama.

Kemudian saya mencermati dan melihat dari pemaparan Bapak ada hal-hal yang membuat saya menjadi ragu kalau misalnya IKN ini memang serius untuk membangun Ibukota Negara.

Yang pertama, saya lebih mencermati permasalahan sumber daya manusia. Pak Sekretaris dulu katanya dari pihak swasta profesional, pasti paham betul bagaimana sumber daya manusia, *human resource management* itu menjadi penting karena merupakan faktor produksi ya yang akan menghasilkan barang atau jasa. Bahkan teori-teori manajemen yang baru menempatkan sumber manusia sebagai investasi. Sehingga nanti ke depannya bisa ada *yielding*-nya bisa dinikmati oleh perusahaannya.

Tapi dari pemaparan Bapak di sumber daya manusia, di sumber daya manusia strukturnya saya tidak melihat ada keseriusan itu Pak. Masih banyak posisi-posisi yang kosong terutama tadi Pak Pimpinan Pak Dolly yang terhormat bicara sama kita mau konsentrasi bahas masalah tanah. Direktur Pertanahannya saja belum ada. Ini serius Pak, kalau Bapak tidak konsentrasi, tidak menghargai sumber daya manusia dengan proyek yang sebegitu besar nilainya dan punya nilai politis yang tinggi ini repot ke depannya. Siapa buat apa harus jelas. Nanti kalau *enggak* bapak bebannya semakin tinggi loh Pak.

Direktur Perencanaan Makro, Mikro belum ada, Direktur Pertanahan belum ada, Direktur Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum ada, Direktur Pendanaan belum ada, yang notabene kalau di pemerintahan Eselon

Ini yang ada dilapangan. Mereka inilah yang merancang, membuat dan pelaksana fungsi-fungsi organisasi di lapangan.

Jadi, saya harap Pak, Bapak/Ibu tahu dari semenjak disahkannya Undang-Undang 3 2022 itu Januari 2022 dan paham betul bahwa Desember 2022 sudah harus jalan. Maka sumber daya manusianya juga harus dipenuhi. Ini menurut saya keteledoran yang *enggak* bisa di ini Pak, di apa ya, dimaafkan begitu. Harus segera secepatnya Bapak isi, itu menunjukkan keseriusan Bapak ya.

Jadi, dari waktu Januari 2022 sampai Desember itu waktunya cukup panjang, posisi-posisi strategis belum diisi bahkan ada isu sengaja posisi ini tidak diisi dan dari berita yang kami dapatkan ada pengajuan untuk organisasi transisi IKN ya. Ini isu Pak, kalau Anggota DPR enaknya gitu boleh ngomong isu, boleh ngomong *hoax* karena dilindungi dengan undang-undang. Tolong Bapak nanti konfirmasi.

Nah, hal-hal seperti ini saya sudah katakan tadi sangat politis, maka dari itu Pak Ketua kita sangat ingin sekali melihat ke IKN langsung, karena ingin melihat kerjanya badan otorita seperti apa? Kalau yang saya lihat di TV yang di Instagram, di medsos, itu yang kerja kementerian semua kok, PUPR, terus mana lagi itu, ATR BPN itu mereka semua Pak. Padahal dalam undang-undang Pasal 36 yang Bapak paparkan ya, bahwa IKN ini melaksanakan kegiatan persiapan pembangunan IKN sesuai dengan, *sorry* mana tadi ya, yang diawal ya.

Lembaga setingkat kementerian bertanggungjawab pada kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibukota Nusantara. Artinya apa? Bapak merangkul semua pekerjaan ini. Maka dalam setiap kerja-kerja yang sifatnya vital dan strategis harus ada teman-teman badan otorita di situ. Saya belum lihat Pak, saya belum lihat kerja-kerja strategis Ibu/Bapak yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah, terutama seperti PUPR, ATR BPN, saya belum lihat. Ini yang harus kita sama-sama pantau Pak Ketua, kita pergi ke sana kita mau lihat, di mana porsi-porsinya teman-teman OIKN, itu yang kedua.

Yang ketiga, saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah *human resource* apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi Pak, apalagi bulan puasa begini mau lebaran, *enggak* ada gajian, *dzholim* kami Pak, kita *dzholim* Pak. Kalau Pak Ustadz Al Mukharom Guspari Gaus pernah ngajarkan ke saya, "maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering". Itu hadist *shohih* betul ya ustadz ya.

Maka kalau kita buat turunannya ya, kita buat tafsirnya ke bawah dari hukum fiqih yang ada lima itu ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah maka yang menunda itu haram Pak. Jadi, bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya Pak, ya. Jadi, tolong dikonfirmasi apakah betul ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan, tiga bulan, dua bulan, empat bulan, lima bulan,

enam bulan. Kalau belum segera bayar Pak, mumpung ini Bulan Ramadhan Bapak masih banyak dapat ampunan. Aamiin.

Yang terakhir masalah formasi KemenPAN RB kebetulan kami punya mitra dan sangat baik Pak Azwar Anas itu Menteri KemenPAN RB. Di sini ada kesulitan mengenai formasi yang katanya tidak dipenuhi, permasalahannya ada di mana? Kembali lagi sumber daya manusia adalah senjata Bapak yang paling ampuh untuk menjalankan Badan Otorita ini. Maka kalau misalnya sumber dayanya tidak ada, formasinya tidak dipenuhi, bagaimana Bapak mau kerja? Apalagi belum lagi nilai-nilai politis yang sangat kental saya lihat dalam pembangunan Otorita ini.

Terima kasih, sekian dari saya.

*Allahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi,

Terima kasih Pak Ihsan memberikan tausiyahnya kepada kita semua.

Pak Toha.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Ketua Otorita IKN dan jajarannya,
Kepala dan jajarannya yang saya hormati,
Teman-teman yang saya hormati,

Saya akan memfokuskan ke halaman 17 Pak. Setelah saya membaca halaman 17 itu kan, tanah yang ada di sana itu adalah tanah kawasan hutan produksi. Dan yang halaman selanjutnya menjelaskan tentang *progress* perolehan tanah hutan produksi tersebut.

Jadi, dari Kementerian LHK, kemudian diterima oleh Otorita IKN lalu Otorita IKN mengajukan hak pengelolaan kepada BPN. Pertanyaannya, sejauhmana *progress*-nya sekarang Pak? Jadi, ini apakah sudah dimasukkan ke BPN, apakah BPN sudah memberikan hak pengeloalan tadi atau gimana?

Karena kemarin ketika kita mengundang BPN itu ada perencanaan-perencanaan wilayah satu, dua, tiga, empat dan seterusnya, itu apakah sama dengan yang disampaikan oleh OIKN tadi, ada wilayah barat untuk apa, timur satu apa, timur dua apa, utara, selatan dan sebagainya. Saya kurang paham pemetaannya, itu apakah sama? Jadi, begini Pak, itu baru dari tanah perolehan dari hutan produksi.

Nah, katanya juga ada tanah hasil dari tanah provinsi, artinya tanah pemerintah provinsi, *nah* ini juga sejauhmana apa perolehannya? *Progress* apa perolehannya. Lalu juga ada tanah-tanah ulayat, ada lagi tanah-tanah kerajaan, ini sejauhmana juga prosesnya? Karena kalau ini tidak segera diselesaikan keabsahannya, statusnya ini nanti jadi kendala di tengah, ini saya hanya mengingatkan saja. Karena bukan hanya tanah hutan produksi saja ya, ini kan *panjenengan* menjelaskannya tanah hutan produksi saja yang di-*progress* begitu loh, ternyata ada tanah-tanah itu Pak. Itu memang tidak dibicarakan secara formal akan tetapi secara informal ya di sana, itu ada tanah-tanah yang *enggak* jelas yang saat ini katanya sudah di-klaim menjadi tanah yang akan dikelola oleh IKN ini. Ini mohon penjelasannya. Jadi *progress*-nya kaya apa perolehan tanah itu?

Saya yakin *panjenengan* semuanya orang-orang professional ya Pak ya. Jadi jangan sampai ada-ada ya sedikit lah, sedikit kesalahan sebelum ini mempunyai dasar yang jelas kemudian melangkah dan langkah ini akan menjadi tidak sah, tidak jelas, tidak formal begitu.

Kaya misalnya nomenkelatur saja Pak, saya pernah menanyakan ke BPN nomenkelatur kalau PerPres itu Ibukota Nusantara ya. Kalau Undang-Undang No. 3 ini Ibukota Negara, ini juga perlu diluruskan, saya juga *enggak* tahu banyak yang nyebut begitu ya, ini peruntukannya apa nomenkelatur ini, peristilahan ini, peruntukannya apa? Dan yang nusantara peruntukannya apa? Yang negara peruntukannya apa? Jadi, bisa dua apa, dua kepanjangan Ibukota Negara sama Ibukota Nusantara menurut Undang-Undang No.36, iya saya.

Kemudian, sebenarnya tadi saya sudah, salah RDTR itu Pak, yang RDTR yang Bapak jelaskan di penjelasan ini, di makalah ini, dipresentasi ini, itu apakah didasarkan pada hasil BPN dalam penentuan perencanaan wilayah itu? Sebelum saya tanyakan apakah sama wilayahnya dengan yang ditentukan BPN, tetapi sebelumnya pertanyaannya adalah apakah itu dasarnya dari perencanaan BPN itu ya.

Saya pikir itu saja Pak, jadi kita fokus ke pertanahannya saja Pak. Karena begini Pak, sekali lagi yang muncul di permukaan, dipresentasi ini mungkin secara formal ya oke. lah artinya, hutan produksi kawasan itu, tanahnya, tetapi ternyata tanah itu bukan dari situ saja, meskipun ini sudah diselesaikan semuanya belum?

Karena rajanya proteslah ya, raja itu punya keturunan generasi. Lah ini kaya apa terbuka saja *enggak* apa-apa Pak, kita akan bantu itu. Karena jangan sampai rencana pemerintah dan rencana kita semuanya, ini gagal karena *enggak* beres di depan begitu, itu saja Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Toha.

Pak Gaus.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Bapak Bambang Kepala Otorita IKN, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini,
Hadirin dan hadirat yang saya muliakan,

Jam 9 pagi tadi saya sudah hadir di sini dan sudah bincang-bincang dengan Pak Bambang. Lalu saya minta izin ke Ketua ada perintah Ketum untuk harus menghadap. Artinya saya tidak terlambat itu yang saya sampaikan Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Dipanggil Ketum ngurusin koalisi besar kayaknya.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):

Pimpinan,

Saya bersama Pak Doli adalah bagian dari Pansus IKN. Bagaimana dinamika daripada kehadiran IKN dinamikanya sangat luar biasa. Apa yang diingatkan oleh adinda Pak Ihsan, itu menjadi cemeti bagi Bapak dalam bekerja secara professional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tentu saya berharap karena yang dibangun ini adalah pusat pemerintahan bukan *real estate*, ini tegas saya juga perlu mengarisbawahi, jangan ada nanti *frame*-nya perencanaannya itu seperti itu, ini milik rakyat, rakyat akan berbondong-bondong datang ke sana. Oleh karena itu tentu dari awal perencanaan itu diperuntukkan adalah untuk membangun Ibukota Negara. Ini perlu saya tegaskan karena kehadiran Bapak-bapak yang di luar pemerintahan memang jadi sorotan ketika pemerintah mengabungkan maksud dan tujuannya memang adalah bagus. Karena adalah Bapak-bapak yang dari swasta sangat berpengalaman tentang itu dan kami pun juga melakukan *study banding*, *study* tiru ke beberapa tempat yang diajak oleh pemerintah dengan kawan-kawan yang Pansus itu, tetapi itu adalah gunanya untuk mempercepat, memicu bagaimana proses ini berjalan sesuai dengan harapan. Jadi, bukan dalam pembentukannya itu untuk seperti yang saya sampaikan. Ini penting Pak.

Yang kedua adalah barangkali kawan-kawan sudah menyampaikan saya terlambat datang dalam forum ini, tadi sudah saya sampaikan, tentu banyak masalah-masalah yang Bapak hadapi, karena kami ketika melakukan survey ke sana itu dalam bentuk hutan dan kami hanya lewat helikopter. Tadi

yang sudah kita ceritakan, sedangkan obsesi dari pemerintah terutama Pak Jokowi sudah sangat jelas bagaimana tahun 2024 itu pelaksanaan daripada hari proklamasi bisa dilaksanakan di situ.

Melaksanakan itu ya gampang-gampang saja, ada di dalam hutan juga bisa melaksanakan itu tapi apa yang dikandung maksud oleh Presiden itu adalah itu adalah percepatan terhadap pembangunan. Percepatan terhadap pembangunan tentu akan menimbulkan masalah manakala di dalamnya itu banyak masalah-masalah yang harus Bapak-Bapak selesaikan. *Complicated*, saya rasa banyak.

Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan tadi ada semacam ketidakseriusan persoalan tanah. Kami ini mitra dari BPN ATR Pak, tidak kunjung selesai, makin rumit, *complicated* dan lain sebagainya. Di satu sisi itu belum ditaro orang yang professional yang menanggapi tentang hal itu. Ini-ini jadi, apakah Bapak serius atau tidak ini? Ini jadi beban moral bagi kami terutama kami-kami yang di Pansus, sampai detik ini masih banyak masyarakat yang tidak setuju terhadap pemindahan IKN Pak. Maaf baca saja di mass media dan ini juga merupakan tantangan juga bagi Bapak untuk *survive*, walau pun ada tantangan seperti juga pelaksanaan pemilu, eh pilkada di 9 Desember hampir seluruh elemen tidak setuju Pak.

Sehingga kami bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu sangat hati-hati dan sangat *concern* dan serius, akhirnya *alhamdulillah* sangat sukses Pak. Sukses dalam berbagai hal, dalam menghadapi pandemi Covid tidak ada menimbulkan masalah dan juga prosentase kehadiran juga mencapai sasaran dan itu, itu menjadi pemicu Bapak juga hendaknya menurut hemat saya.

Oleh karena itu bengkalai-bengkalai masalah-masalah harus diselesaikan sedini mungkin, artinya apa? Kami ini di Komisi II sangat berharap ini *survive* pekerjaan Bapak, jangan ada sandungan apalagi ada informasi kita *enggak* tahu juga rezim sekarang ini. Tetapi kalau misalnya dalam kondisi sekarang ini, keadaannya tidak mengembirakan, bisa-bisa saja undang-undang itu direvisi, mangkrak dan lain sebagainya. Ini kan rugi besar negara dan bangsa ini, itu juga harus Bapak perhitungkan. Ini yang saya ingin tegaskan.

Kemudian tentu saya juga ingin, pengen mendapatkan *progress report* yang Bapak lakukan sampai detik ini kondisinya dalam keadaan apa, prosentasinya bagaimana dan bagaimana pula pelaksanaan itu, kapan titik dari pada pelaksanaan itu yang diinginkan oleh pemerintah.

Kalau saya tidak salah anggaran tahun 2022 itu anggaran yang diturunkan itu adalah 12T, betul atau tidak? 2023 adalah sebanyak 23,6T. Namun, *nah* ini namun Pak, anggaran itu dimasukkan pada pagu anggaran kementerian dan lembaga yang bentuknya dengan kerjasama dengan otorita ini bagaimana? Ada yang ke PUPR, ada ke Kementerian Lingkungan Hidup, ada yang Kementerian Perhubungan, total ada juga yang dari invest, kementerian investasi, BUMN dan lain sebagainya. Nilai totalnya adalah 2023 itu 23,6T. Harusnya kan Bapak tahu itu betul apa *enggak* ini?

Kemudian bagaimana koordinasi, kemudian pemanfaatan apakah hanya otoritanya, otoritasnya seperti itu. Bapak ini kan yang punya otoritas, itu kesepakatan, kami dulu tidak setuju namanya otorita Pak, otorita itu sama dengan Batam, pelaksana tugas, bukan pemerintahan, tetapi akhirnya saya dan juga kawan-kawan yang tidak setuju kalah dalam menyikapi itu, akhirnya kami terima.

Termasuk juga nama nusantara itu karena Ibukota dalam kurung titik-titik, di *last minute* baru dibunyikan nusantara. Saya ingat betul, karena saya aktif dalam menyikapi pembahasan undang-undang itu.

Oleh karena itu juga banyak masalah yang Bapak hadapi tentang investor dan lain sebagainya dan lari dan ini dan itu, rayuan yang luar biasa puluhan tahun diberikan hak guna usaha dan lain sebagainya sampai 90 tahun, informasi yang kami dapatkan dari berbagai media. Tetapi respon kalau yang kami dengar apa betul apa tidak, tentu saya minta konfirmasi juga dalam rangka percepatan ini. Investor yang masuk itu sejauhmana? Apa ada atau bagaimana, walaupun ada sejauhmana komitmennya?

Ini adalah juga dalam rangka percepatan, kalau datang investor tentu sudah duit Bapak tampung tentu bisa melakukan pembangunan. Sebab anggaran ini menurut yang kita bahas Pak, hanya dari anggaran jumlah yang ditetapkan dulu itu adalah 466T. Negara, pemerintah, APBN hanya mengalokasikan anggaran itu 20%, tentu Bapak harus mampu mengaktualisasikan apa yang diamanahkan oleh undang-undang ini.

Kemudian apakah mampu kita untuk mewujudkan seperti gambaran perencanaan yang dibuat itu? *Nah* inikan sulit juga bagi Bapak, kalau *enggak* ada uang bagaimana Bapak bisa membangun, jumlahnya hanya sekian, hanya dari APBN. Sedangkan yang lainnya adalah dari KPBU, swasta, BUMN, BUMN sekarang ini Bapak lihat sajalah gimana, semuanya pada rontok dan rugi kan, apakah bisa kita mengharapkan anggaran dari BUMN itu?

Kemudian dari investor swasta yang kita inginkan jumlahnya adalah 253M, 253T sampai detik ini bagaimana pula *progress report*-nya. Ini adalah juga bagian skenario yang merupakan tugas dan tanggung jawab Bapak.

Nah, inilah maksud dan tujuan kami barangkali bagaimana kehadiran Bapak di Komisi II adalah dalam rangka *men-support* Pak. Saya mungkin mengarisbawahi apa-apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Karena ini adalah bidang pemerintahan, mitra Bapak itu di Komisi II Pak. Walaupun berkaitan dengan anggaran, tugas kami juga membahas anggaran Pak, bukan Komisi XI. Maaf kalau ada yang menyebut tadi maaf, saya tidak bermaksud untuk itu, karena kami semua mitra kami ini kan ada pembahasan anggarannya Pak, dia akan butuh anggaran. Apakah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR BPN. Di mana membahasnya? Di sini. Lalu nanti dibawa ke Badan Anggaran, itu mekanismenya.

Jadi, saya mengarisbawahi karena saya tidak meng-copy apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, bahwa ada persoalan apa saja yang berkaitan tentang prosesi pelaksanaan pembangunan IKN itu. Bapak koordinasi saja dengan Pimpinan kami untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II dalam rangka men-*support* langkah-langkah perencanaan yang sudah digariskan. Mudah-mudahan obsesi ini bisa terwujud sesuai dengan harapan dan keinginan.

Dan saya berharap kalau ada masalah-masalah juga tolong sampaikan kepada kami *insyaallah* kita akan carikan jalan keluar. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik untuk apa yang sedang Bapak hadapi itu. Barangkali demikian Pimpinan, mohon maaf atas segala kekurangan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Gaus.

Pak Rifqi.

F-PDIP (H.M. RIFQINIZAMI KARSAYUDA, S.H., M.H.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang saya hormati,
Kepala Otorita, Wakil Kepala Otorita IKN beserta seluruh jajaran yang saya hormati,

Pertama saya punya sejarah sebelum Pansus IKN ini dibentuk di DPR, yang diketuai oleh Pak Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua kami di Komisi II. Menteri Bappenas PPN. Pada saat saya menjadi Anggota Komisi V dulu sejak awal kami dilantik pada akhir 2019, awal 2020 telah memaparkan rencana pembangunan Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur.

Pada saat itu saya mengatakan bahwa IKN ini adalah perjuangan kita semua secara kolektif dari sisi anggaran, bukan hanya *multi years programme* tetapi *multi period programme* dan karena dia adalah *multi period programme* maka pendekatan yang harus kita lakukan untuk IKN tentu harus memiliki alas hukum yang kuat, yang memungkinkan tidak goyah antar satu periode ke periode lain. Kendati memang tidak ada jaminan sedikitpun pergantian rezim dan arah politik hukum itu akan tetap bertahan.

Satu-satunya alasan saya kira yang akan membuat IKN ini dipertahankan adalah sejauhmana *progress* kita semua bekerja untuk IKN. Karena itu pertanyaan pertama saya, dari skala 0% sampai 100% sudah berapa persen kira-kira capaian yang dikerjakan di IKN? Baik secara otonom oleh otorita IKN maupun oleh kementerian lembaga lain. Kita tahu tentu dari sisi anggaran tidak semua ada di otorita IKN tetapi juga ada di kementerian lembaga lain.

Kami di Komisi II DPR RI perlu mendapatkan keyakinan berapa prosentase itu sehingga kita bisa berhitung nanti sampai dengan akhir 2024 kami ini masa jabatan habis 1 Oktober 2024. Saudara Presiden habis masa jabatan 20 Oktober 2024 kita akan sampai pada titik mana?

Saya sejak awal termasuk yang agak pesimis Pak Kepala dan Wakil Kepala Otorita terkait dengan intervensi investasi di IKN, kalau kemudian kesimpulan dengan dana APBN itu tidak kita lakukan dengan baik dan saya kira pesimisme saya pada di Komisi V dan sekarang saya di Komisi II itu terbukti bahwa sekali investor yang kita undang, mereka lebih kurang dalam tanda kutip menunggu kira-kira, seberapa mapan kita melakukan persiapan pembangunan infrastruktur, penyiapan kawasan dan lain-lain di IKN. Karena itu diskusi kita menjadi sangat relevan. Seperti tadi yang dikatakan Pak Helmy misalnya kalau kita mengandalkan APBN saja, APBN kita itu sudah *bleeding*-nya sudah luar biasa, karena dua tahun 2020-2021 bahkan 2022 kita harus menanggung akibat dari Covid-19 bukan hanya dalam konteks sektor kesehatan tetapi juga dalam sektor ekonomi dan sosial yang itu angkanya tidak kecil.

Nah, ruang atau portofolio APBN kita untuk IKN menjadi sangat terbatas. *Nah* ikhtiar-ikhtiar ini saya kira perlu kita bicarakan dengan jujur, dengan objektif, dengan terbuka tanpa kemudian harus kita tutupi-tutupi apa yang menjadi persoalan.

Tadi beberapa senior di Komisi II meminta untuk kita petakan masalah. Jadi, satu hal saya ingin bertanya soal *progress*, hal yang lain tentu saya ingin kita bicara soal masalah-masalah yang kita hadapi untuk kita urai bersama. Karena *legacy* ini adalah *legacy* kita bersama bukan sekedar *legacy* Kepala Otorita, Wakil Kepala Otorita. Saya ingin katakan ini bahkan pertarungan karir Pak Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita. Saya tahu betul karir Bapak luar biasa sebelum ditunjuk oleh Presiden sebagai Kepala Otorita bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di tingkat internasional. Jangan sampai kemudian dalam Bahasa Ustadz Ikhsan ini tidak *khusnul khotimah* tetapi *suul khotimah* nanti karena persoalan IKN ini. Sementara IKN itu tidak bisa diselesaikan sendirian oleh Otorita IKN.

Yang kedua, RPP tentang kewenangan khusus otorita sebagaimana amanah dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 itu sampai sekarang kan belum kita bahas, belum pernah dibahas. RPP ini oleh Undang-Undang tentang Ibukota Negara diwajibkan prosesnya harus dikonsultasikan kepada DPR.

Kita tahu di dalam RPP ini ada banyak sekali dimensi, beberapa dimensi diantaranya tentu berkaitan dengan Komisi II DPR RI, terkait dengan pemerintahan, terkait dengan kepegawaian, terkait dengan tata ruang dan pertanahan. Bahkan juga saya kira dalam beberapa hal juga terkait dengan bagaimana hubungan ya antara otoritas IKN dengan provinsi dalam tanda kutip induk Kalimantan Timur.

Kita di Komisi II DPR RI ini Pak sering juga berdebat soal bagaimana posisi wilayah otorita IKN itu sebagai daerah pemilihan dalam konteks *electoral*. Karena hak untuk memilih dan dipilih bagi setiap warga IKN itu kan tidak boleh tidak kita *protect* di dalam konstitusi dan undang-undang.

Nah, hal-hal ini saya kira perlu cepat kita lakukan, kalau kita boleh bilang sangat terlambat RPP ini sudah sangat terlambat. Jangan menunggu Bapak dari kementerian lembaga lain atau dari *leading sector*-nya misalnya di Kemensesneg atau di apa namanya Seskab atau di Kemenkumham, jangan. Bapak saya sarankan lebih aktif untuk mengurus ini karena kalau ini boleh disalahkan siapa yang paling salah nanti menunjuk kepada muka Bapak-bapak, bukan kepada beliau-belliau tadi. Walaupun kalau kita di ruangan ini mengerti siapa sebetulnya yang paling otoritatif untuk kemudian melakukan pengajuan ini, tetapi karena Bapak-bapak sudah ditunjuk saya menyarankan berpikir dan bekerja *out of box* untuk menyelesaikan RPP tentang kewenangan khusus otorita Ibukota Nusantara.

Yang ketiga, terkait dengan pertanahan saya agak khawatir ketika Presiden termasuk mitra kerja kami Menteri ATR BPN mengumumkan kepada publik bahwa ada kebijakan-kebijakan khusus, terkait dengan pemberian hak-hak atas pertanahan di Ibukota Nusantara yang waktunya itu kalau kita perpanjang *totally* bisa 100 sampai 160 tahun.

Kita tahu bahwa di Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang IKN ada beberapa pasal yang memberikan kewenangan secara khusus *lex specialis* kepada IKN dalam konteks pertanahan. Misalnya ada hak pakai, hak pengelolaan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kemudian didalam undang-undang itu tidak disebutkan, waktunya berapa lama. Kemudian dalam peraturan turunannya dibikinlah waktu yang cukup membuat kritik oleh publik.

Bagi saya kritik publik itu bisa dijawab dengan banyak argumentasi tetapi yang paling mengkhawatirkan kalau kemudian haknya sudah diberikan, misalnya kepada calon investor tetapi kemudian nanti digugat ke Mahkamah Agung melalui *Judicial Review*. Karena waktu yang diberikan itu bertentangan atau tidak sama atau tidak linier dengan ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang pokok agraria.

Niat awal kita untuk memberikan kepastian hukum atas pertanahan kepada calon investor, memberikan kepastian agar berinvestasi dengan baik, justru bisa menjadi blunder kalau kemudian ini tidak diantisipasi dengan baik. Justru menurut pandangan saya idealnya RPP-nya itu diselesaikan dulu, di dalam PP itulah kemudian diberikan atribusi hukum kepada IKN, termasuk dalam konteks tata ruang dan pertanahan dan baru setelah itu kemudian ada

intervensi tertentu secara positif tentu, kepada calon-calon investor yang ingin berinvestasi di IKN untuk diberikan kepastian mereka mengelola tanah dalam waktu yang cukup panjang. Tetapi inikan sudah terlanjur terbalik ini, RPP-nya belum tetapi kemudian ketentuan-ketentuan terkait tadi sudah dilakukan.

Yang terakhir saya lahir, besar dan asli Kalimantan Pak. Saya tadi kalau yang kawan-kawan yang lain ingin melihat wilayah atau kondisi *riil* Ibukota Nusantara, itu tempat main saya sejak kecil Pak. Saya *enggak* terlalu tertarik sebetulnya karena pohon-pohon itu, saya ini rindunya kota-kota karena sudah kelamaan di kampung tinggal begitu.

Tetapi belakangan saya mendapat cukup banyak aspirasi dari saudara-saudara saya di Kalimantan yang kalau kita gunakan pendekatan *Legal Formal* mungkin aspirasi ini boleh kita indahkan, tidak kita pedulikan karena mereka tidak memiliki alas hak yang sempurna atas klaim mereka terhadap tanah.

Tetapi persoalannya adalah konstitusi itu memberi perlindungan dan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, satu. Yang kedua, konstitusi juga memberikan pengakuan dan perlindungan dalam konteks hak azasi *human right* terhadap hak-hak atas tanah. Termasuk mereka-mereka yang mengklaim bahwa jauh sebelum IKN ada dan berbagai hak-hak yang diberikan oleh negara itu mereka kuasai, termasuk Kesultanan Kutai Kartanegara yang sudah cerita ke mana-mana dengan berbagai macam besit yang mereka perlihatkan kepada kita semua.

Saya mendorong agar ada proses mediasi yang baik. Sebagai sesama anak bangsa, saya meyakini kita pasti punya jalan keluar untuk ini. Jangan sampai nanti investasi masuk ada pihak keluar masuk, mereka sudah berkomitmen untuk melakukan, mendukung pembangunan di IKN persoalan-persoalan ini belum selesai. Jadi, lebih baik kita selesaikan sekarang mumpung belum terlalu jauh.

Dan saya kira orang-orang Kalimantan itu *by* prinsip orang yang bisa diajak bicara Pak. Bapak kan sudah hampir satu tahun lebih disitukan Pak, orang-orang yang bisa diajak bicara, orang-orang yang saya kira bisa diajak berdiskusi dan bermusyawarah. Kami diajarkan untuk itu sejak saya kecil dan saya kira kita tidak pernah resisten dengan siapapun.

Kalimantan itu orang yang terbuka, berbagai etnis ada di sana, selain kami etnis asli sana, sekarang banyak sekali etnis yang lain. Dan saya kira sekali lagi persoalan yang terakhir ini menjadi *stressing point* saya, agar kita semua bisa memitigasi konflik. Saya tidak akan sungkan-sungkan untuk mengingatkan kita semua pada persoalan yang terakhir ini karena ini adalah aspirasi dan suara dari saudara-saudara kami di Kalimantan.

Terima kasih, selamat bekerja Pak Kepala Otorita, Pak Wakil Kepala Otorita dan seluruh jajaran, terima kasih banyak dan selamat menghasilkan *legacy* bagi Indonesia, Komisi II DPR RI bersama anda.

*Wabilahitaufik wal hidayah,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Rifqi.

Pak Riyanta.

F-PDIP (RIYANTA S.H.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Ihsan sudah pindah ke sana Pak Ihsan?

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Pak Ihsan pindah koalisi besar.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh iya-iya.

Silakan, Pak Riyanta.

F-PDIP (RIYANTA S.H.):

Terima kasih.

Pimpinan Komisi II dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Jajaran Otorita IKN yang saya hormati pula,

Dari yang sudah disampaikan paparan oleh Otorita IKN ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan di Komisi II ini. Saya menyarankan agar Otorita IKN itu menjadi mitra Komisi II, karena saya melihat ada kepentingan-kepentingan yang ada kaitannya dengan BKN, kemudian Kementerian apa PAN, kemudian juga Kementerian ATR BPN, ini yang pertama.

Kemudian yang kedua saya mengulangi yang disampaikan saudara saya yang asli Kalimantan karena beberapa waktu lalu saya sempat menengok ke Samboja Bapak, juga ada satu pesanan dari beberapa lurah maupun masyarakat adat, berkaitan dengan bagaimana tanah-tanah adat dan tanah-tanah ulayat dan juga tanah warga transmigrasi baik yang lokal maupun yang dari luar Kalimantan.

Di mana menurut pengakuannya mereka transmigrasi itu ada yang tahun 70 dan ada tahun 84 itu ada dan kemungkinan ada beberapa yang lain kedatangannya di situ. Dan sama yang disampaikan saudara saya bahwa

mereka, ada yang tidak punya alas hak karena memang menurut pengakuannya itu tanah ulayat. Kemudian ada juga yang alas haknya tetapi baru pada tingkat desa atau kelurahan, bahkan beberapa sudah sampai tingkat kecamatan dan yang saya lihat itu terregistrasi. Ini mohon juga harus diselesaikan secara baik-baik dan yang paling tepat melibatkan ATR BPN sama Kementerian Lingkungan Hidup.

Khusus yang di Samboja yang di hutan apa Tahora itu ya Pak. Di situ dikuasai kalau yang transmigran itu 70-84 sudah menguasai tetapi tiba-tiba di Tahun 2014 muncul surat keputusan Menteri Kehutanan saat itu di situ dijadikan hutan. Ini yang barangkali perlu perhatian kita semua untuk bagaimana hal-hal yang begini diselesaikan secara baik-baik. Kasihan masyarakat yang sudah begitu lama menempati di situ dan mereka membayar pajak.

Kemudian yang ketiga, saya total mendukung IKN itu untuk sukses, kemudian saya menghimbau kepada pengelola IKN, hal-hal apa yang Komisi II perlu *support* apa, karena yang tahu persoalan adalah Bapak-bapak yang di Otorita IKN. Saya yakin kawan-kawan di Komisi II semuanya akan *support*.

Kemudian yang keempat, berkaitan dengan target penyelesaian RDTR-nya itu kapan? Karena tadi yang di wilayah Samboja kemudian Muara Jawa belum *clear*. Itu kira-kira targetnya kapan?

Kemudian juga apakah di dalam tata ruang nanti juga akan menampung sektor usaha kecil mikro Bapak? Seperti pedagang-pedagang yang nanti didorong untuk menjadi pedagang pasar itu loh Pak, karena itu melayani kebutuhan harian nanti.

Kemudian terakhir berkaitan dengan larangan pengalihan hak atas tanah, baik itu tanah yang sudah bersertifikat atau belum bersertifikat, ini sampai kapan karena ini juga menjadi pertanyaan warga masyarakat lokal.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Cukup ya?

Pak Bagus, silakan.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, MH):

Terakhir Pimpinan.

Pimpinan yang saya hormati dan,
Seluruh apa Otoritas yang hadir,

Saya ingin mempertegas apa yang disampaikan Anggota yang sebelumnya, Ketua.

Yang pertama adalah bagaimana kita rapat ini tidak hanya mendengar laporan baik-baik saja. Jadi, yang perlu kita dengar adalah bagaimana permasalahan yang ada di situ. Seperti yang saya masih ingat waktu kunjungan tahun yang lalu. BPN menyampaikan banyaknya *overlap* yang terjadi di bidang pertanahan di areal IKN.

Nah pada kesempatan ini saya ingin mempertanyakan kira-kira gambaran data terkait dengan penyelesaian tanah yang konon ceritanya juga apa, gajah-gajah besar yang memiliki tanah di sana, bagaimana *overlap* tersebut, itu yang pertama.

Yang kedua, adalah terkait dengan tata ruang. *Nah* di tata ruang ini kalau saya baca di materi ini sudah bagus sekali, saya mengapresiasi paparan Pak Kepala juga sangat komprehensif. *Nah*, ini bagus sekali dan akan lebih bagusnya lagi bilamana ada *blue print*-nya, gambaran secara *detail* agar kami di Komisi II ini mengetahui secara *detail* bilamana nanti ada masyarakat bertanya, *nah* kami lebih bisa memperjelaskan secara lebih mendalam.

Nah, dan sejalan dengan yang sebelumnya anggota sampaikan, saya juga secara pribadi mendukung bagaimana Bapak ini menjadi mitra kerja kita dari sisi kelembagaan ini penting sekali. Tidak hanya di dalam menyuarakan keuangan karena banyak hal yang berhimpitan dengan mitra-mitra kerja Komisi II yang lainnya.

Itu kira-kira Ketua yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan IKN ini harapan saya tidak sama seperti halnya kita membangun sarana prasarana PON, sebelum terlaksana semangat semua, tetapi begitu PON selesai semua terbengkalai ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Bagus Adhi.

Cukup ya? Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Kita sudah lewat satu jam lima belas menit, ya *enggak* apa-apa lah karena ini penting menyangkut masa depan Indonesia.

Saudara Kepala Otorita IKN dan,
Bapak/Ibu semua jajaran,

Tadi sudah banyak sekali, hampir semua Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI menyampaikan masukan, saran, pandangan yang saya kira ini baik untuk pengembangan, baik itu untuk otorita maupun juga untuk pengembangan IKN-nya itu sendiri.

Nah, kami persilakan Kepala untuk menjawab dan merespon dari apa yang tadi disampaikan.

Silakan.

KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA ((Ir. BAMBANG SUSANTONO, MCP., MSCE., Ph.D.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Jadi, pertama tentu kami ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua Anggota dari Komisi II yang telah memberikan berbagai macam saran dan juga pendapat yang menurut kami memang kami butuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas ke depan.

Saya ingin mulai dengan peta besar bahwa pemindahan ibukota ini tidak berdiri sendiri seperti halnya disampaikan tadi oleh beberapa penanggap bahwa ini merupakan bagian dari visi Indonesia 2045. Sehingga pada saatnya nanti kita harapkan bahwa IKN menjadi *super hub* ekonomi yang dapat menggerakkan ekonomi yang jauh lebih merata dan juga dapat mengentaskan Indonesia dari *middle income countries* ataupun negara berpendapatan menengah menjadi *high income countries* pada waktunya nanti di 2045. Dan juga ada satu transformasi yang sangat mendasar di situ dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Sehingga diharapkan tadi sudah disampaikan juga bahwa IKN sebagai kota yang kelas dunia, sebagai kota yang juga merupakan perpaduan antara kota pemerintahan dan kota bisnis, kota sosial dan budaya dan juga kota yang menggambarkan kebhinekaan, itu juga nanti akan dapat terwujud pada tahun 2045.

Saya ingin mulai dari tata ruangnya dulu, karena tanah itu merupakan tidak bisa dilepaskan dari tata ruang. Jadi, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya yang kita lihat memberikan amanah kepada kami untuk melakukan pengelolaan di 256.000 hektar.

Bapak/Ibu sekalian,

Di peta yang tadi kami sampaikan 256.000 hektar itu lebih lanjut diatur lagi bahwa 65% dari 256.000 hektar itu akan menjadi hutan tropis. Jadi kalau yang sekarang masih menjadi hutan produksi harus dihutankan kembali sehingga menjadi hutan tropis. 25% akan menjadi kota dan kotanya sendiri diharapkan menjadi kota yang hijau *green* dan kota yang *smart* ataupun berteknologi yang dapat membantu kehidupan sehari-hari dari warga kota itu

sendiri. 10% nanti akan dialokasikan untuk daerah-daerah hijau lain, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan *agriculture* ataupun pertanian.

Sehingga tadi kalau ada pertanyaan tentang pertanian memang ada beberapa pusat-pusat dari 9 wilayah pertanian itu yang akan nanti dijadikan pusat-pusat yang berhubungan dengan pertanian dan juga yang berhubungan dengan *supply change* pertanian. Jadi, ada kemungkinan tidak harus IKN itu memproduksi sendiri beberapa kebutuhan dari kota itu, tetapi juga membuat suatu *supply change* yang berkaitan dengan daerah-daerah lain, sehingga dapat dilakukan efisiensi daripada semua rantai pasok yang berhubungan dengan pertanian. *Nah*.

Bapak/Ibu sekalian,

Dari 256.000 hektar itu yang kita harus lihat juga bahwa IKN tidak berdiri sendiri, ada konsep yang namanya *three city* atau tiga kota yaitu IKN, Balikpapan dan juga Samarinda yang akan menjadi satu bentuk pembangunan regional atau *regional development*. *Nah*, di situ juga dikandung maksud tidak hanya tiga kota ini tetapi juga kota-kota yang nantinya akan menjadi daerah mitra, istilahnya daerah mitra dalam undang-undang dan peraturan perundangan yang lain.

Dibuka kemungkinan bahwa daerah mitra adalah daerah yang memiliki hubungan apakah itu hubungan ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya dengan daerah IKN yang nantinya akan juga dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang akan dinikmati oleh IKN Nusantara.

Tadi misalnya ada beberapa pertanyaan bagaimana dengan daerah-daerah yang langsung berbatasan ataupun daerah yang memiliki hubungan katakanlah ekonomi, saya kira ini bisa dikembangkan lebih lanjut.

Untuk pembiayaan Bapak/Ibu sekalian, memang angka yang kami dapat dari Bappenas melalui satu *study* yang saya kira Pak Ketua Komisi dan juga beberapa anggota Pansus mengetahuinya sekitar 466 triliun dibutuhkan untuk membangun IKN Nusantara di mana 20% nantinya dari APBN dan 80% dimintakan untuk adanya partisipasi swasta.

Nah, ini tadi berkaitan juga dengan pertanyaan PPP akan ada di mana? Saya kira *public private partnership* ataupun konsep pemerintah dan badan usaha, pemerintah dan badan usaha, PPP ini nantinya akan masuk ke sana dan saya kira ini akan masuk ke beberapa sektor bisa saja masuk kepada sektor yang berhubungan dengan infrastruktur saja atau juga bisa berhubungan dengan yang kami sebut sebagai pembangunan wilayah. Jadi, ada bagian-bagian dari pembangunan di IKN yang sifatnya *master developer* ataupun sub *master developer* yang nantinya juga bisa dikelola oleh swasta.

Nah, ini tentu akan juga mengurangi beban pemerintah yang tadi juga disebutkan. Sehingga diharapkan dengan partisipasi swasta ini nantinya keleluasaan fiskal atau *fiscal space* pada jangka panjang mohon diingat bahwa ini nanti akan kita bangun hingga tahun 2045, cukup jauh ke depan. Yaitu 20

tahunan dari sekarang dan diharapkan tentu konsistensi dari pembangunan itu sendiri harus sama-sama kita lakukan dan kita jaga bersama.

Nah, kalau kita lihat dari turunan dari 256.000 hektar tadi kami sampaikan di peta bahwa akan ada sembilan wilayah pembangunan, istilahnya begitu. Jadi RDTR tadi yang ditanyakan apakah RDTR ini sama dengan ATR BPN? Jawabnya adalah sama Ibu/Bapak sekalian. Karena yang membuat pertama juga memang dari ATR BPN dan kemudian dilimpahkan kepada kami dan kemudian dari kami bahan-bahan tersebut tentu kami olah lebih lanjut. Kami lakukan konsultasi publik juga lebih lanjut dan juga kami lakukan beberapa hal yang berhubungan dengan misalnya masukkan-masukkan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Jadi, apa yang kami tetapkan berdasarkan 4 RDTR yang *insyaallah* yang 5 RDTR yang menyusul ini dapat kami lakukan pengesahannya dalam satu, dua bulan ke depan Bapak/Ibu sekalian. Sehingga memberikan satu kepastian karena tata ruang ini akan menjadi satu, itu satu alat kita di mana kita bisa membuat satu kepastian alokasi lahan untuk berbagai macam peruntukkan. Apakah itu peruntukkan pemukiman kemudian peruntukkan lain, misalnya *meksius* ataupun juga *tourism development* ataupun fasilitas pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Nah, itu yang kami sekarang sedang kejar, sehingga harapan kami RDTR ini akan menjadi sama-sama kita jaga, karena kalau tidak jadi ada cerita-cerita misalnya perkembangan di Batam dengan pungli dan sebagainya, karena ketidakmampuan kita untuk menjaga RDTR ini dan itu kaitannya juga dengan pengalihan hak atas tanah Ibu/Bapak sekalian.

Kami tentu akan pertama kali yang kita lihat adalah kesesuaian dengan tata ruang. Apabila sesuai tentu akan lebih mudah bagi kami untuk melakukan berbagai macam kegiatan di sana dan memberikan perizinan misalnya. Tetapi kalau yang tidak sesuai tentu harus kita carikan jalan. Apakah misalnya tanah tersebut akhirnya akan dimiliki oleh otorita ataupun kemudian kita ingin agar yang memiliki juga bisa direlokasi ataupun juga melakukan *land consolidation* atau beberapa opsi-opsi lain yang sekarang kita sedang cari jalannya.

Nah, untuk berapa lama masa tugas kami, tugas OIKN. Saya kira peraturan perundangan sudah mengariskan bahwa kami lima tahunan Bapak/Ibu sekalian dan saya kira kalau kita lihat dari apa yang bisa kita kerjakan dalam rentang waktu hingga 2045, maka persoalan-persoalan yang ada sekarang memang harus dilakukan secara *step by step* dan tidak dapat kita lakukan secara langsung. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang seperti tadi Bapak/Ibu sekalian melihat paparan kami, kami berfokus di 36.000 hektar karena memang itu yang akan kami lakukan sekarang sebagai prioritas. Karena kami ingin 2024 nanti memang ada satu bagian dari kota yang mungkin kira-kira 921 hektar *plus plus* mungkin akan mendekati 1.000 hektar yang nantinya bisa terwujud pada waktu kita melakukan upacara kemerdekaan kita 17 Agustus 2024 dan itu bisa dilihat di lapangan. Apakah itu nanti berupa *tower-tower* daripada perumahan para aparatur ASN dan TNI POLRI, kemudian beberapa *tower-tower* yang juga mungkin akan dibangun oleh swasta.

Kemudian ada 4 kantor Menko yang kita sedang bangun akses-akses jalan dan kemudian juga satu, dua dan mungkin lebih dari itu dari swasta. Kita mengharapkan nantinya juga ada pembangunan dari swasta yang bisa menjadi *show case* di tahun depan. Sehingga itu akan membuat satu *market confidence* ataupun kepercayaan pasar. *Nah* kalau kita lihat itu maka yang kita lakukan sekarang tentunya akan fokus kepada apa-apa yang kita bisa lakukan dalam hal kita membenahi ataupun melengkapi semua peraturan perundangan.

Tadi disampaikan tata ruang kemudian juga berbagai insentif, dengan keluarnya PP investasi Ibu/Bapak sekalian, maka hal-hal yang ditanyakan tadi yang berhubungan dengan masa pemberian hak-hak atas tanah, misalnya sudah terelaborasi di sana dan selanjutnya memberikan hak atas tanah dalam satu rentang waktu. Tidak semata-mata kita memberikan dengan mata tertutup tetapi ada juga *milestone-milestone* ataupun ada beberapa apa rambu-rambu yang kita bisa pakai untuk mengevaluasi Bapak/Ibu sekalian.

Jadi, tidak ada misalnya memberikan satu dalam, langsung dalam satu periode tertentu tanpa adanya evaluasi. Dan evaluasi itu kita butuhkan untuk memperlihatkan konsistensi antara tata ruang dan investasi yang akan kita bangun.

Apakah lahan-lahan yang akan di-*take over* oleh kita itu nantinya akan merupakan pemerintah? Saya kira kita akan ada dua jenis Bapak/Ibu sekalian, yang pertama adalah yang berhubungan dengan pemerintahan akan menjadi barang milik negara, apa di luar itu ada yang istilahnya aset dalam penguasaan dan ini tentunya aset dalam penguasaan kami inginkan agar bisa dilakukan transaksi-transaksi. Terutama untuk perumahan itu bisa dijualbelikan, sehingga nantinya hal-hal yang berhubungan dengan partisipasi swasta, kemudian partisipasi masyarakat juga kita bisa sama-sama lakukan di dalam aset dalam penguasaan itu.

Hal lain yang ingin, koordinasi dengan MenPAN RB Ibu/Bapak sekalian, ini yang akan pindah di tahun depan dimulai dengan 17.000 ASN kira-kira TNI dan Polri. 17.000 itu terdiri dari 5.000 TNI dan 12.000 ASN. Kenapa kita mengadopsi angka tersebut karena kita juga melihat kapasitas dari kantor-kantor yang akan kita bangun Bapak/Ibu sekalian. Jadi, 17.000 itu memang *match* dengan angka-angka ataupun kapasitas dari gedung-gedung yang akan kita bangun pada tahun depan. Kalau terlalu rendah tentunya kita akan melihat gedung-gedungnya nanti kosong, kalau terlalu banyak nanti tentu juga tidak bisa lakukan optimalisasi atau efisiensi. Sehingga apa yang diambil dalam rapat internal dengan Presiden adalah angka 17.000 dan itu merupakan bagian dari 60.000 dari ASN, TNI/Polri yang akan mulai pindah di tahap pertama di tahun depan.

Nah, tentu saja kami sangat *concern* buat yang pindah, tidak hanya pindah itu disediakan perumahannya saja tetapi juga fasilitas lain. Seperti kesehatan, pendidikan dan bahkan juga *amusement* ataupun hiburan yang akan kita coba wujudkan dengan partisipasi swasta untuk membangun kemungkinan ada Departemen Store di sana, kemungkinan juga ada beberapa *brand* yang akan masuk di sana, sehingga mereka nanti akan betah untuk

berada di IKN dan pindah sebagai pindah yang pertama. *Nah*, itu semua yang sekarang kita lakukan dan kita detailkan bekerjasama dengan KemenPAN RB.

Ibu/Bapak sekalian,

Jadi MenPAN RB yang-yang membuat satu *list* dan *list* itu tentu dikonsultasikan dengan masing-masing K/L, kementerian lembaga, masing-masing KL yang akan pindah sudah dimintakan, siapa saja yang kira-kira harus pindah pada tahap pertama ini dan nantinya tentu akan secara bertahap mereka akan pindah dengan satu budaya baru. Ini permintaan Presiden bahwa budaya baru itu adalah *working, new working leaving, the working* dan *running* katanya begitu. Jadi, bekerja, hidup dan juga belajar satu pola katakanlah birokrasi yang baru yang harus diwujudkan di IKN di masa depan. *Nah*, jadi 17.000 itulah yang akan pindah di tahap awal.

Hal lain yang ingin disampaikan adalah dalam hal permasalahan atau pun, bukan permasalahan sebetulnya karena dengan mereka saudara-saudara kita yang sekarang ini memang ingin agar hak-hak ulayat, hak-hak masyarakat adat itu nanti akan di apa. Katakanlah dimodifikasi dan juga diberikan wadah yang sesuai untuk ini, kami dan para deputi sudah turun ke lapangan Bapak/Ibu sekalian, dan melakukan dialog dengan mereka. Saya kira dalam hal kita melihat permasalahan ataupun meletakkan mereka di dalam kerangka bahwa mereka itu adalah warga kami di IKN.

Jadi, apakah itu masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang hidup di sana, kami melihatnya sebagai warga kami, warga IKN dan tentunya kami harus bantu semaksimal mungkin, agar mereka nanti juga kesejahteraannya meningkat, agar mereka juga nanti tidak menjadi penonton pada waktu IKN itu dibangun. Kami ingin mereka juga bagian dari IKN itu sendiri.

Kami juga membuka kemungkinan adanya *heritage area*. Jadi ada satu atau dua atau tiga area di dalam IKN Nusantara yang memang memperlihatkan bahwa ada kearifan lokal di situ, ada beberapa hal-hal yang berhubungan dengan budaya dan sebagainya yang berhubungan dengan adat yang dapat tetap dilakukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN ke depannya.

Jadi, kami dalam proses sekarang adalah melakukan dialog-dialog dengan berbagai pemuka-pemuka masyarakat dan juga berbagai macam kelompok masyarakat adat dan sebagainya.

Nah, untuk yang berhubungan dengan tanah, saya kira mafia tanah dan sebagainya. Ini memang kami sedang menyelesaikan satu Perka untuk transaksi pertanahan. Kami harapkan ini juga akan nanti segera kami tetapkan yang akan mengatur bagaimana nanti mereka yang memiliki tanah itu dapat melakukan transaksi. Tentunya berbekal saya sama dengan beberapa Ibu/Bapak sekalian yang tadi menganjurkan bahwa untuk kepastian hukum dan sebagainya, maka tata ruang merupakan salah satu yang memang kita harus pegang. Dan dari situlah nanti kita dapat melakukan berbagai macam kegiatan-

kegiatan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan keseharian dari para penduduk yang akan hidup di IKN Nusantara.

Untuk nomenkelatur Ibu/Bapak sekalian, saya kira di Undang-Undang No.3 2022 disebutkan bahwa Ibukota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut Ibukota Nusantara. Jadi, memang sebelumnya IKN ini kadang-kadang disebut IKN Ibukota Negara. Tetapi kemudian dengan setelah adanya undang-undang ini kita bisa mengatakan bahwa IKN itu adalah Ibukota Nusantara.

Untuk RPP kewenangan khusus Ibu/Bapak sekalian. Kami mungkin mohon ada arahan lanjut karena dari rekan-rekan di Bappenas, terutama yang menjadi inisiator dari undang-undang ini. RPP ini, menyampaikan bahwa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Pak Tito itu sudah pernah dikonsultasikan Bapak Kepala, Bapak Ketua Komisi II di Komisi II. Sehingga posisi sekarang memang Bappenas mengajukan bersama Kemendagri mengajukan ke Kemensesneg untuk dilakukan kemudian nanti ke Kemenkumham, harmonisasi dan ditetapkan.

Jadi, kalau kami mendengar informasinya ini sudah dibahas di Komisi II sebelumnya, sehingga ini memang sudah dalam posisi lanjut begitu. Tanggalnya juga kami memiliki tanggal 21 September Ibu/Bapak sekalian, pada ada dalam salah satu butir yang menyatakan bahwa ini memang sudah dilakukan konsultasi.

Nah, untuk yang karyawan dan sumber daya manusia, kami senang sekali tadi mendapatkan saran dan usulan bahwa ini memang sangat penting, kami sendiri melihat ini sangat penting Pak. Kami *keteter* kalau boleh jujur, kalau ini tidak segera dilengkapi ya. Kami melakukan rekrutmen, iya. Dan kemudian tapi ada beberapa yang kami masih terkendala. *Nah* mungkin kami mohon dapat bantuan dari Ibu/Bapak yang terhormat di Komisi II untuk dapat meng-*hire* mereka yang dari swasta.

Kami sekarang masih terkendala dengan Undang-Undang ASN bahwa dari swasta tidak bisa masuk di level direktur Pak. Padahal kami ingin sekali bahwa ini karena IKN Nusantara ini diharapkan menjadi satu pola *how to manage the new city* ke depan begitu ya. Ini harusnya kita juga melihat bahwa aspek profesionalisme, aspek-aspek kemampuan dari individu itu yang dilihat. Apakah itu dari swasta ataupun *non* swasta, pemerintah dan selanjutnya. Saya kira itu nanti merupakan yang kedua. Tetapi yang pertama justru kompetensi yang kita inginkan.

Jadi, kami dalam posisi meminta fatwa dari MenPAN RB dan KASN untuk dapat merekrut level Direktur itu dari swasta. Jadi, ini mungkin satu point Bapak Pimpinan sidang yang kami ingin juga mohon bantuan bahwa ini kalau bisa secepatnya. Sehingga kami dapat melakukan rekrutmen secepatnya, sehingga kemampuan, kapasitas dari organisasi kami dapat kami tingkatkan dengan sesegera mungkin.

Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu PerPres tentang hak keuangan Eselon I dan turunannya pada saat ini ya. Kalau boleh jujur juga saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan *salary* begitu. Jadi, sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat Eselon I ke bawah ini di Menkopolkukham, Ibu/Bapak sekalian dan ini meluncur ke Presiden sekarang begitu.

Jadi, ini teman-teman saya ini teman-teman yang tangguh Bapak/Ibu sekalian, jadi ya demikianlah kondisinya. Dan mereka juga apa tetap bekerja dengan semangat, tetapi tentu saja kami tidak melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat Ibu/Bapak sekalian.

Tentang kantor Ibu/Bapak sekalian, apakah kami hadir di lapangan? Iya. Kami sekarang memiliki tiga kantor di Jakarta di Menara Mandiri, kemudian di Balikpapan kami punya kantor dan di lapangan Ibu/Bapak sekalian. Jadi, ada satu lantai di hunian pekerja konstruksi yang kami pakai sebagai *basecamp* di lapangan sehingga kami bisa melakukan koordinasi dengan para pelaksana di lapangan. Jadi, kami akan sangat menyambut baik kalau-kalau Ibu/Bapak sekalian bisa menengok kami di sana, bisa melihat kondisi langsung di lapangan bagaimana kami bekerja dan bagaimana situasi di lapangan. Tentunya kami akan menjadi vitamin buat kami, jadi *booster* buat kami, apalagi di tengah-tengah apa yang kami lakukan sekarang.

Setiap hari kami menghitung hari ini Pak, ini sudah 500, kalau *enggak* salah 3 hari atau 502 hari hingga 17 Agustus 2024 ya. Jadi, kami dengan adanya apa Ibu/Bapak sekalian, dukungan dan sebagainya, tentu kami ingin sekali dapat dukungan yang lebih lagi dari Ibu/Bapak sekalian. Buat kami mitra kerja dan seterusnya tentu kami serahkan kepada Pimpinan nantinya. *Nah*.

Ibu/Bapak sekalian,

Ada beberapa permintaan yang mungkin kalau boleh diizinkan kami jawab tertulis begitu ya, sehingga, misalnya tadi *progress report*, tentu kami ingin menyampaikan 167 *letter of interest* dari luar negeri, dalam negeri itu apa saja misalnya, dibidang apa saja dan kemudian tahap apa saja yang kami sekarang kami sedang lakukan. Karena kami juga melakukan berbagai macam katakanlah kalau swasta ingin masuk, itu kan mereka tidak langsung serta merta naroh duit terus iya kita teken. Mereka juga melakukan *feasibility study* dan itu yang sekarang kita lakukan. Mereka minta data ke kita, kita antar di lapangan, kita perlihatkan misalnya kondisi topografinya seperti apa, kemudian kapan misalnya air bersih, listrik, *fiber optic* masuk, itu juga kami berikan datanya kepada mereka. Jadi, masih dalam proses memang dalam titik ini tetapi kok kami optimis *insyaallah* Ibu/Bapak sekalian akan ada nanti dalam beberapa bulan mendatang *ground breaking* dari swasta apakah itu bentuknya rumah sakit, klinik, ataukah itu bentuknya misalnya universitas atau *mixsius*, *departemen store* dan sebagainya.

Harapan kami tentu IKN ini nanti tidak hanya dihuni ataupun ada *departemen store* yang untuk kalangan menengah saja atau ke atas tetapi juga kami coba nanti akan juga menunjukkan UMKM Ibu/Bapak sekalian. Karena di PP investasi yang kami punya, UMKM itu pajaknya nol. Jadi memang mereka tidak dikenakan pajak dan tentu saja akan menjadi kebanggaan kita semua kalau di sana juga ada yang jual pecel lele, ada yang jual bakso, ada yang jual kopi-kopi yang *branding*-nya Indonesia yang kita bisa nikmati dan *insyaallah* kita bisa nikmati di 17 Agustus 2024 pada saat nanti Ibu/Bapak sekalian juga ke sana untuk upacara bendera kemerdekaan kita.

Jadi, kami usul Ibu/Bapak sekalian, sisanya nanti kami akan dapat lengkapi dalam waktu satu minggu dengan jawaban tertulis.

Kami kembalikan kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik, terima kasih Saudara Kepala Otorita IKN Ibukota Negara Nusantara.

Bapak/Ibu sekalian,

Tadi kita sudah sama-sama dengarkan respon, jawaban dari Otorita, memang mungkin tidak mungkin kita membahas semuanya dalam waktu yang cukup singkat pada hari ini. Karena saya tadi mencatat dari semua yang disampaikan oleh baik Pimpinan maupun Anggota Komisi II, bukan hanya sekedar masalah tanah begitu. Kita ini ya tadi karena memang kita ikut membidangi lahirnya undang-undang ini, apa korelasi kita itu jadi tinggi ya, karena apa begitu yang sedang terjadi di sana, kira-kira begitukan. Makanya pertanyaannya dari berbagai prespektif. Saya kira nanti memang harus dijawab tertulis lebih detail.

Tetapi intinya kalau berkaitan soal pertanahan, pesan tadi yang disampaikan oleh semua kita di sini adalah bahwa kita berharap tanah yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan IKN itu, baik yang 256 atau sampai yang terkecil yang KIPP itu *clear and clean* begitu ya. Jadi, tidak ada berkaitan dengan atau berpotensi memunculkan sengketa atau konflik, baik itu terutama dengan masyarakat apalagi begitu ya. Kemudian tanah ulayat misalnya, terus kemudian ya atau pihak ketiga atau swasta. Itu saya kira pesan yang dari kita semua terkait dengan soal tanah.

Kemudian yang kedua, tentu karena memang pembangunan dimulai dari nol, pengelolaan tata ruangnya lebih bagus. *Nah*, harusnya memang penetapan BPN-nya itu *visioner* jauh ke depan sudah bisa mengantisipasi misalnya 20 atau bahkan mungkin 100 tahun yang akan datang. *Nah*, itu nanti akan berdampak dengan soal lingkungan hidup dan seterusnya. *Nah*, nanti jawaban tertulis itu nanti kita akan cek terutama soal *progress* pembangunan yang mau kita capai sampai tanggal atau dipertengahan 2024 mungkin tahunnya yang mulai sudah harus pindah itu ya. Termasuk soal pengalihan ASN yang tadi disebutkan ada 12.000, 5.000 TNI dan segala macam itu.

Mungkin nanti kami akan datang ke sana langsung ya, nanti kita buat kunjungan kerja spesifik ya. Mungkin di masa setelah reses nanti setelah lebaran ya, masa sidang ke V, nanti kita akan bicara lebih detail dan langsung lihat ke lapangan.

Jadi, kalau tadi Pak Kepala mengatakan ada dua kantor, tiga kantor, satu di sini, dua di sana, mungkin kita akan rapat di dua kantor di sana, lihat. Saya kira itu ya Bapak/Ibu sekalian yang, ya.

Silakan-silakan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Hanya memberikan gambaran sepintas, dari apa yang disampaikan Kepala Otorita tadi berkenaan keinginan untuk apakah orang dari pihak swasta bisa diletakkan sebagai direktur atau dibaurkan kerjasama dengan para tim ASN yang akan pindah sekian ribu itu.

Pengalaman yang sudah yang kita lihat dan sudah dipraktekkan, justru di KemenPAN RB sekarang ini. Jadi orang yang dari swasta kemudian statusnya berubah menjadi P3K kemudian dari status P3K ini dengan SK Presiden dia ditempatkan di Kementerian PAN RB, namanya Pak Budi Alex itu, jadi beliau itu dari BUMN, ini contoh saja. Barangkali ini mungkin bisa diikuti langkah seperti itu. Jadi, statusnya P3K dengan status sebagai Staff Ahli tetapi ya statusnya sama dengan yang lainnya, itu mungkin bisa.

Terima kasih Pak.

KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (Ir. BAMBANG SUSANTONO, MCP., MSCE., Ph.D.):

Mohon izin Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan.

KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (Ir. BAMBANG SUSANTONO, MCP., MSCE., Ph.D.):

Itu yang diizinkan Bapak tadi untuk Eselon I Bapak. Tetapi yang Eselon II yang kami tertutup Pak, jadi di level direktur. Jadi Eselon I ini memang rekan-rekan saya ini sebagian dari swasta sudah, tetapi yang di Eselon II dibawah yang kami lihat sebetulnya, kalau kita melihat Singapura atau negara-negara maju itu memang bauran itu akan membuat satu ritme birokrasi yang sangat-sangat lincah Pak, *echa* Pak.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik. Terima kasih.

Sebelum kita tutup kita akan membacakan dan mengambil kesepakatan tentang kesimpulan rapat kita ini. Ada tiga kesimpulan, yang pertama saya bacakan.

1. "Dalam rangka pemenuhan lahan Ibukota Nusantara...",
"...Ibukota Negara Nusantara...". Kurang "Negara".
"...melalui pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah Komisi II DPR RI meminta Otorita Ibukota Nusantara",

"...Ibukota Negara Nusantara."

Atau benar?

KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (Ir. BAMBANG SUSANTONO, MCP., MSCE., Ph.D.):

Izin Pak.

Sebenarnya boleh "Ibukota Nusantara" kalau menurut undang-undang yang tadi ya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Boleh ya?

"Untuk mempercepat proses pengadaan lahan tersebut dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan. Seperti tanah hak individu, tanah ulayat dan tanah adat agar kegiatan pembangunan Ibukota Nusantara berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada tahun 2024."

KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (Ir. BAMBANG SUSANTONO, MCP., MSCE., Ph.D.):

Izin Pak.

Masukkan dari teman-teman tanah ulayat atau tanah adat Pak?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke atau dan/atau, tanah ulayat.

KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (Ir. BAMBANG SUSANTONO, MCP., MSCE., Ph.D.):

Kalau tidak salah di sana tidak ada.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tidak ada tanah ulayat? Tidak ada tanah ulayat.

KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (Ir. BAMBANG SUSANTONO, MCP., MSCE., Ph.D.):

Belum pernah ditetapkan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tanah adat saja kalau begitu, tidak ada status tanah adat?

KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (Ir. BAMBANG SUSANTONO, MCP., MSCE., Ph.D.):

Mungkin secara formal memang belum pernah ada ditetapkan tanah ulayat dan tanah adat Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sudah kalau begitu pakai tidak usah pakai tanda kurung saja, jadi masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan, begitu saja, oke?

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Ketua,

Kanan.

Saya tadi menanyakan masalah ini soalnya. Jadi sebenarnya di ribuan hektar itu pasti ada tanah ulayat, tanah adat dan tambahan tanah kerajaan, makanya *progress*-nya kaya apa kan tadi belum dijawab.

Nah, maksud saya ini masuk ke dalam kesimpulan juga kerajaan ini, jangan sampai inikan kita hanya menyarankan dan memastikan bahwa itu diperhatikan begitu loh Pak, bukan kita memaksakan untuk kita, itu diperhatikan dan diselesaikan secara baik-baik, secara benar. Itu-itu Pak, saya malah kurang tanah.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, kan maksudnya tadi sudah dijelaskan bahwa disana belum ada yang berstatus tanah ulayat dan tanah adat. *Nah* saya tidak tahu kalau misalnya ada tanah kerajaan, memang saya pernah dengar itu, ada yang kerajaan apa, Kutai apa segala macam itu, itu gimana statusnya? Tidak ada yang masuk?

KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (Ir. BAMBANG SUSANTONO, MCP., MSCE., Ph.D.):

Formal tidak ada Bapak. Tetapi memang kami mempertimbangkan dan membuka dialog dengan mereka, baik Kesultanan Kutai Kartanegara maupun Kesultanan Pasei dan juga membuka dialog dengan misalnya suku adat Pak atau Suku Pasai dan sebagainya. Itu memang kami lakukan sekarang tetapi kalau itu kita masukkan, seolah-olah nanti mereka sudah ada formalnya demikian Pak, bahwa itu kami lakukan dengan mempertimbangkan bahwa mereka juga merupakan warga kami Pak, warga IKN Nusantara, itu kita lakukan Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, jadi saya kira itu tadi bagi masyarakat tanahnya digunakan untuk pembangunan saya kira sementara ini sudah cukup, nanti kita lihat saja nanti di sana kalau misalnya.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Jadi, begini Ketua, permasalahannya itu bukan di OIKN-nya tetapi permasalahan di pemerintahan provinsi, karena itu kan beliau-beliau ini IKN mendapatkan tanah dari provinsi tetapi tanah itu belum beres begitu loh, belum beres Provinsi dengan pihak tertentu tadi, bisa jadi tanah ulayat, tanah kerajaan, tanah ini, begitu loh Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke, artinya dalam konteks ini kan kita *enggak* ada masalah toh dalam kesimpulan ini.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Mempertimbangkan tanah-tanah rakyat dan tanah pihak lain saja.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Itu, "mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan."

Nanti detailnya kalau memang tadi ada aspirasi yang masuk misalnya nanti pada saat kita ke sana, ya kita kan mungkin bukan hanya dengan Otorita saja kita ini, mungkin dengan Pemda sana kita akan panggil, mungkin dengan masyarakat di sana juga kita akan ketemu, saya kira begitu. Begitu ya, setuju Pak ini. Oke.

(RAPAT: SETUJU)

2. Terkait dengan rencana penyusunan detail tata ruang wilayah Komisi II DPR RI meminta kepada OIKN agar melakukan perlibatan publik secara

luas dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, kegiatan pertambangan, pencemaran pesisir dan laut, agar ke depan rencana detail tata ruang atau RDTR mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif, mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan, serta melindungi kehidupan masyarakat di sekitar IKN dan wilayah adat sebagai implikasi pembangunan infrastruktur IKN.

Saya kira *enggak* ada masalah ini. Wilayah adat?

KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (Ir. BAMBANG SUSANTONO, MCP., MSCE., Ph.D.):

Izin Bapak Pimpinan.

Jadi dan "wilayah adat" nya itu kalau boleh dihilangkan kemudian sebagai implikasi pembangunan IKN saja Pak karena pembangunan IKN itu termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya, kalau boleh kami usul.

F-PKB (DR. Ir. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI):

Ketua,

Usul Mas Doli.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan.

F-PKB (DR. Ir. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI):

Saya kira begini ya, kita kan juga khawatir nanti terjadi ada sengketa tanah yang diakibatkan oleh pengambilalihan tanah ulayat ataupun adat ya. Jadi, kita menggunakan klausul *if* saja.

Jadi bisa ditambahkan, "untuk mempertimbangkan keadilan tanah masyarakat jika terdapat tanah ulayat atau tanah adat", begitu ya.

Kecuali Pak Kepala di sini sudah menyampaikan *firm* portofolio dari ATR BPN bahwa *fix* tidak ada tanah ulayat ataupun tanah adat ya. Kita kan karena sebagai Anggota DPR mewakili rakyat tentu visi kita harus mempertimbangkan ya.

Terima kasih Ketua.

KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (Ir. BAMBANG SUSANTONO, MCP., MSCE., Ph.D.):

Izin Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (Ir. BAMBANG SUSANTONO, MCP., MSCE., Ph.D.):

Jadi, kata "jika" itu saya kira bisa menjadi penengah, jika terdapat begitu ya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, jadi langsung saja, "di sekitar IKN koma termasuk jika ada wilayah adat." Wilayah adat koma iya, "sebagai implikasi pembangunan infrastruktur IKN."

KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (Ir. BAMBANG SUSANTONO, MCP., MSCE., Ph.D.):

Izin Bapak.

Kata "sekitar" itu boleh dihilangkan, "sekitar" karena "sekitar" itu mungkin di luar kami juga Pak. Jadi, mungkin kami tidak memiliki kewenangan juga di sana.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

IKN iya oke.

Iya, kalau singkatan OIKN itu memang sudah formal ya, OIKN itu sudah dibakukan dan populer sekarang.

KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (Ir. BAMBANG SUSANTONO, MCP., MSCE., Ph.D.):

Iya Pak, OIKN Otorita IKN.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik. Kita setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi II DPR RI mendorong Kepala OIKN untuk melakukan percepatan penyelesaian proses legislasi enam peraturan perundangan terkait tata ruang dan pertanahan, ini untuk dukungan kita ini.

"Untuk" atau "segera"-lah, "untuk segera melakukan" iya, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Dengan kita sudah bisa menyepakati tiga kesimpulan pada Rapat Dengar Pendapat kita hari ini maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita.

Sebelum saya tutup saya atas nama Komisi II DPR RI mengucapkan terima kasih kepada Saudara Kepala Otorita IKN beserta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini.

Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* *alhamdulillah* *alhamdulillah*, Rapat Dengar Pendapat hari ini saya nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.25 WIB)

Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua,

*Wabilahitaufik wal hidayah,
Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,

a.n. *Ma*

Mahmud, S.E.
NIP.196508021988031002